BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

RENCANA KERJA
PUSIKNAS BARESKRIM POLRI T.A. 2023

KEPUTUSAN KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI
NOMOR: KEP/ 16 /VII/2022/PUSIKNAS, TANGGAL 21 JULI 2022

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL
Nomor: Kep / 16 /VII/2022

tentang

RENCANA KERJA PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pusiknas Bareskrim Polri Tahun Anggaran 2023 maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (1) huruf j yang menjelaskan bahwa "Guna melaksanakan tugas pokoknya, Polri berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional";
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 5 Mei 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lampiran XVIII: Bareskrim Polri);
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lampiran XVIII: Bareskrim Polri)

5 Peraturan.....

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/655/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Penunjukan Wali Data dan Produsen Data Kriminal Nasional;
7. Keputusan Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri Nomor: Kep/32/VI/2020/Pusiknas tanggal 30 Juni 2020 Tentang Rancangan Rencana Strategis Pusiknas Bareskrim Polri TA. 2020-2024.

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3762/V/REN.2.3./2022/Srena tanggal 13 Mei 2022 perihal pelaksanaan Pagu Indikatif Polda/Satker T.A. 2023;
2. DIPA Petikan Satker Pusiknas Bareskrim Polri Nomor: SP DIPA-060.01.1.678164/2022 tanggal 12 Maret 2022 tentang Pengesahan DIPA revisi ke-1 Pusiknas Bareskrim Polri T.A. 2022 kode digital stamp 7944-1109-3675-8534;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023.

1. Rencana Kerja Pusiknas Bareskrim Polri T.A. 2023 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Bid, Subbag, Urtu dan Urkeu dijajaran Pusiknas Bareskrim Polri;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 Juli 2022

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

HERU DWI PRATONDO, S.H., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Irwasum Polri.
2. Kabareskrim Polri.
3. Asrena Kapolri.
4. Karorenmin Bareskrim Polri.

DAFTAR ISI

Halaman

I. **LATAR BELAKANG** 1

A. Kondisi Umum 1

1. Perkembangan Aspek Kehidupan 5

2. Analisa SWOT 10

B. Identifikasi Masalah 14

1. Permasalahan umum 14

2. Permasalahan Bidang Pembinaan 15

3. Permasalahan di Bidang Operasional 16

4. Deskripsi Pengembangan Sistem PIKNAS dan CMIS Tahun 2023 17

II. **TUJUAN DAN SASARAN** 20

A. Visi Polri, Bareskrim Polri dan Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2023 20

1. Visi Polri 20

2. Visi Bareskrim Polri 21

3. Visi Pusiknas Bareskrim Polri 22

B. Misi Polri, Bareskrim Polri dan Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2023 22

1. Misi Polri 22

2. Misi Bareskrim Polri 22

3. Misi Pusiknas Bareskrim Polri 22

C. Tujuan Polri, Bareskrim Polri dan Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2023 23

1. Tujuan Polri 23

2. Tujuah Bareskrim Polri 24

3. Tujuan Pusiknas Bareskrim Polri 24

D. Sasaran Strategis Polri, Bareskrim Polri dan Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2023 25
1. Polri 26
2. Bareskrim Polri 27
3. Pusiknas Bareskrim Polri 28

III. **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLRI, BARESKRIM POLRI DAN PUSIKNAS BARESKRIM POLRI TAHUN 2023** 30
A. Arah Kebijakan dan Strategi Polri Tahun 2023 30
B. Arah Kebijakan dan Strategi Bareskrim Polri Tahun 2023 37
C. Arah Kebijakan dan Strategi Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2023 42

IV. **PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF T.A. 2023** 45
..... 45
Program dan Kegiatan Pusiknas Bareskrim Polri .....

V. **PENUTUP** 47
Penutup 47

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023;
2. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023;
3. Sasaran Prioritas, Arah Bijak Dan Strategi Renja Pusiknas Barekrim Polri Tahun 2023;
4. Data Materiil;
5. Operasi Sistem CMIS;
6. Rincian Kertas Kerja Satker Pusiknas Bareskrim Polri T.A. 2023.

BADAN RESERSE KRIMINAL POLR
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

RENCANA KERJA
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL T.A. 2023

I. LATAR BELAKANG

A. Kondisi umum

Tahun 2023 merupakan Tahun keempat dari Tahapan Rencana Strategis Polri 2020-2024 yang merupakan kelanjutan dari Rencana Strategis Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2015-2019 sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Pusiknas Bareskrim Polri T.A. 2023 Pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusiknas Bareskrim Polri di Tahun 2022, tidak terlepas dari kerja keras seluruh personel Pusiknas Bareskrim Polri dan dukungan yang kuat dari Instansi terkait. Namun harus diakui juga bahwa keberhasilan yang telah dicapai belum sepenuhnya memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusiknas Bareskrim Polri, sehingga diperlukan adanya kelanjutan dan kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusiknas Bareskrim Polri pada T.A. 2022. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dalam hal ini Pusiknas Bareskrim Polri sebagai bagian dari subsatker Polri dibawah Bareskrim Polri. Oleh karenanya sebelum adanya penyusunan Rencana Kerja Pusiknas Bareskrim Polri yang berpedoman kepada RKA-KL kebutuhan Indikatif, maka disusunlah Renja yang berpedoman kepada rencana kebutuhan Satker Pusiknas Bareskrim Polri T.A. 2023 dan telah dijabarkan kedalam kertas kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pusiknas Bareskrim Polri. Renja Pusiknas Bareskrim Polri T.A. 2023 ini merupakan penjabaran dari Renstra Pusiknas Bareskrim Polri 2020-2024 sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri Nomor: Kep/05/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Rencana Strategis Pusiknas Bareskrim Polri T.A. 2020-2024.

Rencana.....

Rencana Kerja (Renja) Pusiknas Bareskrim Polri T.A. 2023 disusun dengan memperhatikan visi Pusiknas Bareskrm Polri di Bidang Pusat Informasi Kriminal Nasional pada Renstra Pusiknas Bareskrim Polri 2020-2024 dimana visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan layanan data dan informasi kriminal nasional yang valid dan terpercaya;
2. Meningkatkan integrasi pertukaran data antar satker Polri, penegak hukum dan Kementerian/Lembaga yang berwenang dalam penegakkan hukum.

dengan sasaran strategis Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terselenggarannya produk layanan data dan informasi kriminal nasional yang valid dan terpercaya;
2. Terselenggaranya pengembangan sistem Piknas yang modern;
3. Terselenggaranya sinergitas antar Kementrian/Lembaga dalam pengelolaan data kriminal nasional;
4. Terselenggaranya analisis data kriminal Nasional yang akurat;
5. Terselenggaranya standarisasi arsitektur dan pengelolaan data kriminal nasional;
6. Terwujudnya SDM Pusiknas Bareskrim Polri yang kompeten;
7. Meningkatnya pemenuhan Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Pusiknas Bareskrim Polri berbasis Teknologi dan Informasi";
8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Terbuka dan Melayani;
9. Terkelolanya anggaran Pusiknas Bareskrim Polri yang akuntabel;
10. Pengawasan pengendalian yang efektif.

Capaian atas pelaksanaan tugas Pusiknas Bareskrim Polri sampai saat ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup membanggakan dengan ditandai semakin banyaknya input data LP dan IDK yang di input melalui sistem Piknas dan Sistem CMIS dinilai cukup berhasil dan mendapat apresiasi yang positif dari pimpinan Polri. Keberhasilan yang

dicapai .....

dicapai Pusiknas Bareskrim Polri tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh Personel Pusiknas Bareskrim Polri dengan didukung oleh Pembina Fungsi satker Bareskrim Polri dan partisipasi kewilayahan dalam menginput LP dan IDK melalui sistem Piknas dan CMIS. Setiap torehan prestasi tidak serta merta membuat Pusiknas Bareskrim Polri puas dan berbangga diri, namun menjadikan tantangan bagi Pusiknas Bareskrim Polri dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Seiring dengan capaian keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya, Pusiknas Bareskrim Polri masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari Pimpinan Polri untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang informasi kriminal Nasional yang sampai saat ini dinilai belum terpenuhi dan harapan pimpinan Polri dimana Pusiknas Bareskrim Polri menjadi penjuru dalam memberikan informasi kriminal terhadap masyarakat. Adapun tantangan dan harapan pembina fungsi Satker Bareskrim Polri dan Pimpinan Polri tersebut antara lain:

1. Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri disingkat Pusiknas Bareskrim Polri adalah sebagai Pusat Layanan Informasi Kriminal Nasional yang modern, cepat, mudah dan terkini guna mendukung keberhasilan penegakan hukum dan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat;

2. Menyelenggarakan pengelolaan data kejahatan transnasional dan menyalurkan kepada Tim Investigasi Kriminal Nasional maupun transnasional, serta memasukkan data pada program CMIS (Case Management Intelligent Sistem).

Tantangan .....

Tantangan Pusiknas Bareskrim Polri dalam pelaksanaan tugas kepolisian kedepan semakin besar, hal ini sebagai implikasi dari perkembangan lingkungan strategis baik global, regional dan nasional. Pengaruh lingkungan strategis tersebut telah menjadi fenomena yang harus dihadapi Pusiknas Bareskrim Polri pada era globalisasi saat ini, dimana dunia telah berkembang seolah tanpa batas seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat yang dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai dan budaya bangsa yang berdampak pada berkembangnya perilaku-perilaku negatif masyarakat seperti materialistis, konsumtif dan hedonistis.

Perkembangan lingkungan strategis global seperti demokratisasi, paham radikalisme, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia dari suatu negara ke negara lain sangat cepat. Kondisi ini berdampak pada perkembangan kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, cyber crime, penyelundupan manusia, narkotika, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan (kabut asap), pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme. Selanjutnya perkembangan lingkungan strategi nasional harus dilihat dari faktor-faktor ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah di setiap daerah. Semua isu strategis baik Global, egional dan nasional tersebut harus diperhatian dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja Tahun 2023.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Pusiknas Bareskrim Polri yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan dianalisa dengan pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai berikut:

1. Perkembangan aspek Kehidupan:

   a. Global

      Lingkungan strategis global senantiasa berkembang dan dipengaruhi oleh isu-isu global seperti isu demokratisasi khususnya oleh negara-negara dalam proses transisi, hak asasi manusia, krisi ekonomi, pemanasan global, radikalisme dan terorisme, dan kejahatan lintas negara. Perubahan lingkungan strategis global secara spesifik dapat dilihat sebagai berikut:

      1) upaya pemerintah Indonesia menghadapi transformasi global yang tertuang dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) 2016-2030 sebagai kelanjutan dari MDGs (*Millennium Development Goals*) 2000-2015 merupakan upaya pemerintah Indonesia merespons perkembangan dunia internasional yang sejalan dengan visi dan konsep Nasional (Nawacita dan RPJM 2015-2019 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Agenda global tersebut harus mengedepankan kepentingan nasional sesuai kemampuan bangsa, khususnya di level daerah. Dalam artian tidak perlu mengikuti semuanya, namun cukup memilih dan berfokus pada hal-hal yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

      2) Ketegangan akibat konflik Rusia dan Ukraina diperkirakan memberikan dampak pada ekonomi makro dunia dan Indonesia khususnya, dampaknya seperti pada sektor finansial, sektor komoditas, serta jalur perdagangan. Perang dapat berisiko pada kenaikan harga komoditas dari Rusia-Ukraina. Karena Russia adalah salah satu produsen dunia minyak bumi, kalium karbonat (potash) bahan baku pupuk, dan industri pertambangan seperti nikel, alumunium dan palladium.

Rusia .....

Rusia dan Ukraina juga merupakan negara pengekspor utama gandum. Perang Rusia-Ukraina dapat berdampak pada kenaikan harga minyak bumi yang diperkirakan meningkat mencapai lebih dari $100/barrel. Dan sebelumnya sudah mengalami hambatan logistik akibat COVID-19. Konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan berisiko memperburuk supply chain dan memicu kenaikan harga yang mengakibatkan terpuruknya perekonomian dunia khususnya bagi negara miskin dan berkembang.

3) Konstelasi politik global dan regional akan menjadi tantangan khususnya bagi negara yang terbuka dan luas seperti Indonesia terhadap kebijakan politik luar negeri terutama masalah demokrasi, HAM, lingkungan hidup dan pemanasan global serta perang terhadap terorisme, terjadinya pergeseran nilai-nilai dan budaya bangsa ke arah global, yang berdampak pada berkembangnya perilaku-perilaku negatif seperti individualistis, materialistis, konsumtif, radikal dan hedonistis. Lingkungan strategis regional pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kekhawatiran mengenai dampak terhadap sektor-sektor usaha dalam negeri sebagaimana hubungan bilateral Indonesia dengan Tiongkok mampu menguasai pasar domestik dapat mengganggu stabilitas Indonesia;

4) Pluralisme sebagai konsep toleransi antar umat beragama yang dikembangkan dalam rangka menciptakan perdamaian dunia dalam implementasinya terdapat perbedaan pemahaman dan penolakan yang mengarah terjadinya konflik rasisme. Ketakutan terhadap Islam (Islam phobia) sebagian masyarakat atau pemerintah di beberapa negara di dunia yang berpenduduk minoritas Islam menimbulkan perlakuan seringkali melukai perasaan

umat...

umat muslim, sehingga memunculkan solidaritas muslim seluruh dunia;

5) Kampanye yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengajukan diri menjadi anggota DK PBB merupakan usaha bagi bangsa Indonesia dimana Indonesia dinilai bisa lebih berperan untuk mereformasi PBB agar multilateralisme berlaku efektif. Indonesia juga bisa berperan sebagai negara demokrasi, dengan jumlah penduduk muslim terbesar, terutama untuk model-model konflik maupun penyelesaiannya.

6) Fenomena global citizen, atau 'warga dunia' yang tidak lagi mempersoalkan kebangsaan, kecenderungan untuk bekerja di negara lain, bermigrasi, bahkan pindah kewarganegaraan lain semakin menguat di berbagai bangsa, terutama di kalangan muda. Perhatian generasi muda dalam masa lima tahun mendatang dan seterusnya terhadap aspek global akan semakin menguat, melampaui batasan kebangsaannya masing-masing.

b. Regional

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan regional adalah perkembangan situasi global, disamping peran dan kepentingan negara-negara besar, ditambah dengan permasalahan hubungan antar negara dalam satu kawasan. Berbagai persoalan atau konflik yang terjadi di kawasan akan memiliki pengaruh terhadap kondisi keamanan internasional dan nasional negara yang ada dalam kawasan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1) Pada KTT ASEAN ke-28 Indonesia mengangkat issue strategis dikawasan Asia Tenggara dengan tajuk *ASEAN Declarationon One ASEAN, One Response:*

ASEAN Responding to Disaster as One in the Region and Outside Region. Pada KTT ASEAN tersebut, Indonesia, mengangkat 7 (tujuh) issue strategis dikawasan Asia Tenggara, adalah sebagai berikut: Perdagangan manusia atau *trafficking in persons*.

Proses ratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)*, sudah dijalankan oleh Indonesia sehingga sangat penting untuk menyelesaikan akar permasalahan kasus-kasus yang ada, namun tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM);

2) Perang merupakan salah satu peristiwa yang menyebabkan banyak kerugian salah satunya kerugian di bidang ekonomi. Mengingat saat ini hampir seluruh negara di dunia menganut sistem perekonomian terbuka yang berkaitan erat dengan perdangangan internasional dan aliran modal asing, maka terjadinya perang pastinya akan mengganggu stabilitas ekonomi global. Rusia merupakan produsen minyak bumi terbesar di dunia, sekaligus Ukraina merupakan negara yang menjadi produsen gandum terbesar di dunia. Sehingga dengan adanya perang maka akan sangat mengganggu stabilitas perdagangan internasional Akibat kekurangan supply atau pasokan dari dua komoditas penting bagi kehidupan ini maka harga komoditas perdagangan dunia akan sangat terganggu terutama pada komoditas energi dan pangan. Sehingga mengakibatkan terpuruknya perekonomian dunia khususnya bagi negara miskin dan berkembang. Keterpurukan ekonomi suatu negara akan berakibat pada kriminalitas yang tinggi pada suatu negara.

3) Isu....

3) Isu Melanesian Brotherhood (Persaudaraan Melanesia) masih tetap digunakan sebagai strategi penyusunan kekuatan negara-negara Melanesia, yang dapat memberikan pengaruh terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Vanuatu dan Nauru adalah Negara yang pernah secara terbuka mendukung perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM), sehingga tetap perlu diwaspadai. Tokoh OPM di Vanuatu yang tergabung dalam organisasi *West Papuan Peoples Representative* (WPPRO) aktif melakukan kegiatan propaganda mendukung kemerdekaan Papua Barat;

4) Ketegangan di kawasan semenanjung Korea terkait uji coba nuklir Korea Utara dan Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah di Laut Cina Selatan, sehingga menimbulkan protes oleh negara-negara Asean Sehingga terjadinya perang urat sarap antara Tiongkok dengan AS serta Negara Asean;

Indonesia sebagai negara yang tidak terlibat dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan menghimbau para pihak yang terlibat sengketa untuk menyelesaikannya secara damai demi tercapainya kestabilan kawasan. Indonesia mendorong agar pembahasan *Code of Conduct* untuk mengatur regulasi Laut Tiongkok Selatan segera dirampungkan. Pembahasan tersebut masih terus diupayakan oleh tim *Declaration of Conduct* (DoC) yang terdiri dari negara ASEAN dan Tiongkok.

2. Analisa .....

2. Analisis SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunity, Threat)

Sebagaimana dinamika perubahan lingkungan strategis yang telah dijelaskan diatas baik secara internal maupun eksternal, maka Pusiknas Bareskrim Polri harus melakukan upaya-upaya agar pengaruh lingkungan strategis tersebut dapat menjadi suatu peluang bukan ancaman yang dapat mempengaruhi peran kepolisian secara umum dan peran Pusiknas Bareskrim Polri secara khusus sebagai unit yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan sistem informasi kriminal nasional.

Atas dasar pengaruh lingkungan strategis tersebut, menjadi dasar mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisa SWOT untuk menentukan arah strategi dan kebijakan Pusiknas Bareskrim Polri kedepan. Adapun hasil analisa SWOT adalah sebagai berikut:

1) Kekuatan (Strengths)

a) Tugas Pusiknas Bareskrim Polri membina dan menyelenggarakan pembinaan fungsi sistem informasi kriminal nasional tercantum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repblik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b) Postur kekuatan Pusiknas Bareskrim Polri sebagai pelaksana teknis bidang informasi kriminal nasional yang berada di bawah Kabareskrim Polri;

c) Dukungan terhadap sarana dan prasaranan yang meningkat dari tahun ke tahun baik peralatan operational teknis di bidang informasi dan peralatan operasional perkantoran;

d) Meningkatnya dukungan anggaran operasional pengelolaan sistem informasi kriminal nasional pada tiap tahunnya;

e) Terisinya .....

e) Terisinya jabatan pada sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Pusiknas Bareskrim Polri sesuai dengan yang dijabarkan pada Perpol Nomor 2 Tahun 2020 tentang Struktur organisasi dan Tata Kerja Polri semakin meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Pusiknas Bareskrim Polri;

f) Adanya tunjangan kinerja/remunerasi kepada personel Pusiknas Bareskrim Polri telah memberikan dorongan, semangat untuk terus melaksanakan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.

2) Kelemahan (Weaknesses)

a) Rasio perbandingan antara anggota Polri pada Pusiknas dan penduduk masih belum ideal;

b) Masih rendahnya keterampilan dan kemampuan personel Pusiknas di lapangan terutama dalam segi penguasaan sistem informasi;

c) Masih terbatasnya jumlah personel Polri yang berkualitas dan memiliki kompetensi/ kemampuan dalam mengoperasionalkan Sistem Piknas maupun CMIS sehingga masih menggunakan tenaga konsultan IT;

d) Reformasi di bidang kultural belum menunjukan kemajuan yang optimal terlihat dari masih ada anggota Pusiknas Bareskrim Polri yang menerapkan paradigma lama dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan Pusiknas Bareskrim Polri;

e) Anggaran .....

e) Anggaran Pusiknas Bareskrim Polri belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggaran prioritas Pusiknas Bareskrim Polri apalagi untuk pemenuhan anggaran ideal Pusiknas Bareskrim Polri sehingga alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai serta mendukung belanja barang guna kegiatan operasional Pusiknas Bareskrim Polri, sedangkan untuk pemenuhan belanja modal masih kurang sehingga belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas dan materil yang dibutuhkan dalam pelayanan prima;

f) Perampingan struktur organisasi di kesatuan kewilayahan, mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah anggota yang sangat mempengaruhi kinerja operasionalisasi sistem Piknas dalam mengolah data informasi kriminal nasional.

3) Peluang (Opportunities)

a) Program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memberikan peluang bagi Bareskrim Polri untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Bareskrim Polri mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural;

b) Semakin terjalinnya hubungan lintas sektoral dengan instansi/lembaga terkait (*Partnership)* baik dalam negeri maupun luar negeri dalam mendukung kebijakan Sinergi Polisional Proaktif;

c) Adanya .....

c) Adanya dukungan dari Legislatif (Komisi III DPR-RI), Eksekutif (Menkeu) dan Bappenas dalam upaya meningkatkan anggaran Polri dari tahun ke tahun;

d) Tugas operasional Pusiknas Bareskri Polri dalam mengelola data informasi kriminal nasional menjadi peluang bagi Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat (Trust Building) terhadap Polri.

4) Ancaman (Thearts)

a) Kecenderungan meningkatnya 4 (empat) jenis kejahatan (konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi) serta penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang semakin menganggu stabilitas dan keamanan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi pelaksanaan tugas Pusiknas Bareskrim Polri;

b) Perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi disamping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, serta kecepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Pusiknas Bareskrim Polri untuk mampu menyajikan data secara valid;

c) Turbulensi gangguan keamanan dapat terjadi di setiap tempat dan setiap waktu, baik secara konvensional maupun peningkatan kejahatan yang menggunakan teknologi canggih, serta terjadinya gangguan keamanan berimplikasi kontingensi di beberapa daerah tertentu serta penggunaan media sosial pun sering digunakan untuk menyebarkan *hoax* dan kebencian yang menganggu stabilitas dan keamanan nasional sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat;

B. Identifikasi .....

B Identifikasi Masalah

1. Permasalahan umum

   a. Polri dihadapkan pada berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran, kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia sehingga diperlukan sistem jaringan mulai dari pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kriminal dan pelanggaran yang cepat, tepat guna dan akurat, aman dan akuntabel;

   b. Proses Globalisasi dan kemajuan IPTEK juga menghadirkan berbagai ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya yang perlu diantisipasi;

   c. Kinerja organisasi Polri dalam memberikan pelayanan Kamtibmas prima di era demokratisasi dan keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Polri. Oleh karena itu peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Polri harus terus dilakukan penyempurnaan. Di sisi lain dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, perubahan *mind set* dan *cultur set* di lingkungan Polri terus dilakukan serta konsep kesejahteraan personel Polri menuju kinerja organisasi Polri lebih baik harus terus diperbarui;

   d. Percepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polri untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;

   e. Media sosial pun sering digunakan untuk menyebarkan *hoax* dan ujaran kebencian yang menganggu stabilitas dan keamanan nasional;

   f. Belum maksimalnya sinkronisasi data di lingkungan Polri terkait data Kriminalitas, data lalulintas, dan data gangguan kamtibmas;

   g. Belum maksimalnya hubungan kerjasama eksternal Polri dalam rangka pemasukan data, pertukaran data kriminal nasional.

h. Pelayanan .....

h. Pelayanan public kepolisian yang prima yang didukung peralatan Polri berbasis teknologi sampai komunitas terkecil di kewilayahan belum maksimal tergelar dan belum dapat diberdayakan secara efektif;

i. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masih ada yang belum efektif apabila disandingkan dengan Analisa Beban Kerja (ABK), HTCK, serta struktur program dan anggaran yang ada sekarang ini belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

2. Permasalahan Bidang Pembinaan

a. Personel di lingkungan Pusiknas Bareskrim Polri :
Personel pendukung pelaksana kegiatan (Banum/Bamin Golongan II) di masing masing Bidang dan subbagian mengalami kekurangan Personel, sementara untuk personel pada golongan III dan IV mengalami kelebihan dengan perincian kekurangannya :

1) Subbag Binfung dibutuhkan Banum 2 (dua) orang;
2) Subbag Ren dibutuhkan jabatan Banum 1 (satu) orang;
3) Bid Kerma dibutuhkan jabatan Banum 1 (satu) orang;
4) Urtu dibutuhkan Banum 1 (satu) orang;
5) Urkeu dibutuhkan Banum 2 (dua) orang;

b. Begitu pula dengan pers yang mengawaki ruang Data Centre Pusiknas Bareskrim Polri di butuhkan tenaga ahli di bidang IT baik yang bersuber dari Polri maupun PNS;

c. Eselonisasi jabatan Kabid di lingkungan Pusiknas Bareskrim Polri yang semula di Divisi Telematika Polri yaitu Eselon II B2, setelah validasi organisasi ke Bareskrim Polri turun menjadi II B3 berdasarkan Perkap 21 Tahun 2010.

3. Permasalahan ...

3. Permasalahan di bidang Operasional

Pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka penyajian Pusat Informasi Kriminal Nasional :

a. integrasi data kriminalitas (LP dan perkembangan kasus) antara aplikasi E-Managemen Penyidikan (E-MP) Robinops Bareskrim Polri dengan sistem Pusiknas belum berjalan lancar/belum semua dokumen administrasi penyidikan diintegrasikan ke sistem Piknas;

b. masih terdapat data yang belum terisi sempurna pada saat integrasi dengan aplikasi E-Managemen Penyidikan;

c. integrasi data dengan Korlantas terputus dikarenakan perubahan skema integrasi dari Korlantas Polri, dan yang sudah pernah berjalan baru integrasi data Laka (data summary) sedangakan untuk data Langar belum berjalan;

d. integrasi data dengan Sops Polri (SPOT) terputus dikarenakan perubahan skema integrasi data dari SOPT;

e. implementasi update aplikasi LP Offline belum berjalan, dikarenakan keterbatasan anggaran;

f. kegiatan pertukaran data SPPT-TI saat ini belum mengakomodir seluruh flow/alur pertukaran data/matriks pertukaran data, yang baru berhasil disimulasikan adalah flow/alur singkat;

g. implementasi pertukaran data SPPT-TI belum berjalan pada lokasi pilot project, hal ini dikarenakan perubahan skema integrasi data dan penyempurnaan aplikasi masing-masing K/L.

3. Deskripsi .....

3. Deskripsi Pengembangan Sistem Informasi Kriminal Nasional Tahun 2023 sebagai berikut :

1) Penggunaan aplikasi untuk kemudahan penyebaran informasi (Mobile-App, Datawarehouse)

a) Menindaklanjuti pengumpulan data berdasarkan hasil data yang telah dicapai dengan kegiatan tahun 2022, sehingga penyebaran dan transparansi informasi dapat terwujud;

b) Dengan pencapaian hasil pengumpulan data pada kegiatan sebelumnya, maka perlu dipersiapkan untuk membangun "datawarehouse". Pembangunan ini dimaksudkan untuk membuat pemodelan data agar lebih mudah dibuat laporannya: "summary", analitik. Datawarehouse dimaksudkan juga sebagai database hasil integrasi dari berbagai sumber data sehingga dapat dijadikan sebagai bahan analisis.

2) Penyempurnaan aplikasi SPPT-TI .

a) Aplikasi yang digunakan oleh "Web Service" untuk melakukan pertukaran data, baik aplikasi yang digunakan untuk mengirim data Polri ke instansi penegak Hukum lain, dan sebaliknya;

b) Aplikasi Reporting dan Dashboard yang digunakan untuk memonitor pertukaran data;

c) Menentukan Pemetaan kewilayahan dari masing-masing institusi penegak Hukum;

d) Menentukan item-item data yang akan dipertukarkan sesuai dengan Matrik Pertuaran Data yang telah disepakati (Menidaklanjuti Item yang dilakukan pada periode sebelumnya);

e) Menentukan komponen dari Matrik Pertukaran Data (SPDP,dll) dan skenario pelaksanaan pertukaran;

f) Membuat .....

f) Membuat paramerter evaluasi hasil pertukaran;

g) Membuat jadwal untuk masing-masing institusi yang dijadikan target pertukaran;

h) Melakukan sosialisasi, dan koordinasi.

3) Penggunaan Aplikasi & Piloting PPNS

a) Melengkapi aplikasi untuk pengelolaan data Laporan Kejadian (LK);

b) Melengkapi aplikasi untuk pengelolaan data tindak lanjut penanganan kasus;

c) Membuat skema "User Management";

d) Sosialisasi, koordinasi;

e) Membuat jadual untuk masing-masing K/L yang memiliki PPNS sebagai Piloting;

f) Melakukan evaluasi hasil Piloting.

4) Penggunaan Teknologi GSB dari Kominfo

a) Menentukan spesifikasi teknis perangkat keras yang akan digunakan untuk implementasi GSB berdasarkan data-data yang telah dimiliki saat integrasi sebelumnya;

b) Melakukan inventarisasi model koneksitas yang digunakan oleh aplikasi (pemrograman) saat integrasi dilakukan menggunakan model Point-to-Point, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas, di mana saja akan dilakukan modifikasi program;

c) Berkoordinasi dengan institusi penegak hukum lain untuk membahas tentang volume dan frekuensi pertukaran data, sehingga dapat diperoleh kesepahaman bahwa data-data yang akan dipertukarkan harus menggunakan model GSB;

d) Berkoordinasi .....

d) Berkoordinasi dengan pemiliki teknologi (Kominfo) agar mendapatkan panduan untuk mengimplementasikan GSB;

e) Mempersiapkan untuk mengintegrasikan data dan layanan informasi kriminal di lingkungan Polri dan Kementerian/Lembaga berbasis Teknologi Informasi.

5) Evaluasi Tata-Kelola Sistem

a) Evaluasi faktor-faktor dalam tata-kelola dari sisi SDM sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

b) Evaluasi fakto-faktor dalam tata-kelola dari sisi kegiatan (Monitoring aktifias sistem, Inventarisasi perangkat & umur perangkat, metode backup, jadual evaluasi sistem), apakah sudah dilaksanakan.

6) Penyempurnaan Backup Sistem (Data, Aplikasi, Jaringan)

a) Menyempurnakan spesifikasi teknis (Data, aplikasi, jaringan) untuk menentukan model backup (Backup data / Backup sistem);

b) Berkoordinasi dengan pendukung infrastruktur (Div TI) untuk menyediakan fasilias backup;

c) Menentukan model Backup Database (Mirroring, Replikasi, atau manual backup).

7) Penggantian, Perbaikan dan Perawatan Peralatan Fungsional Sistem Piknas dan CMIS

a) Pemeliharaan perangkat Infrastruktur;

b) Perpanjangan warranty;

c) Pemeliharaan data, visualisasi dan integrasi;

d) Pemeliharaan perangkat lunak atau aplikasi (Website, Peta Wilayah Hukum, Dasboard, Catatan Kriminal, OPS, Tata Kelola Pengguna, Master Data Management, Manajement Source Code, Project Manajement System, PPNS, SDGs, dan Portal);

e) Pemeliharaan perangkat lunak atau aplikasi CMIS (Case Manajement Intelegent Sistem).

8) Evaluasi .....

8) Evaluasi efektifitas Dashboard & Pelaporan

Evaluasi terhadap jenis data yang bisa ditampilkan, tipe visualisasi, serta kemampuan dilakukannya "drill-down" sampai dengan detil data.

9) Integrasi data Internal Polri (Pusinafis, Div Hubinter, Sabhara, SDM Polri)

a) Menentukan komponen dari Matrik Pertukaran Data (SPDP, dll) dan skenario pelaksanaan pertukaran
b) Membuat paramerter evaluasi hasil pertukaran
c) Membuat jadual untuk masing-masing institusi yang dijadikan target pertukaran
d) Melakukan sosialisasi, dan koordinasi

II. TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2023

A. Visi dan Misi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Renstra Lembaga merupakan penjabaran visi dari Lembaga tersebut dan di lengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden. Renstra Polri dalam hal ini sudah mengacu kepada aturan yang berlaku mengenai perumusan visi, dimana visi Polri harus memiliki keterkaitan dengan visi dan misi dari presiden terpilih. Berdasarkan hal-hal tersebut, Polri menetapkan visi yaitu:

1 Visi Polri:

"Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib".

a. Makna Visi Polri:
Terwujudnya Indonesia Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

b. Visi .....

b. Visi Polri tersebut diatas kemudian harus dijabarkan ke visi dan misi Bareskrim Polri, sesuai dengan lingkup, kewenangan, dan fungsinya. Dalam merumuskan visi Bareskrim Polri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu visi Bareskrim Polri harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Bareskrim Polri, visi Bareskrim Polri juga harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Bareskrim Polri. Mengacu pada hal tersebut, visi Bareskrim Polri adalah sebagai berikut.

2. **Visi Bareskrim Polri :**

"Terwujudnya penegakan hukum yang professional, modern, humanis, dan berkeadilan".

a. Makna Visi Bareskrim:

1) Profesional : dalam melakukan penegakan hukum, Bareskrim Polri harus memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan.

2) Modern: penegakan hukum didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, sehingga selalu mengikuti perkembangan zaman dalam hal melakukan proses penegakan hukum.

3) Berkeadilan : penegakan hukum dilakukan dengan tidak memandang bulu karena setiap masyarakat sama kedudukannya dimata hukum.

b. Visi Bareskrim Polri tersebut diatas kemudian harus dijabarkan ke visi dan misi Pusiknas Bareskrim Polri, sesuai dengan lingkup, kewenangan, dan fungsinya. Mengacu pada hal tersebut, visi Pusiknas Bareskrim Polri adalah sebagai berikut.

3. Visi .....

3. **Visi Pusiknas Bareskrim Polri :**

"Terwujudnya informasi kriminal nasional yang *valid* dan terpercaya."

a. Makna Visi Pusiknas Bareskrim:

1) Valid, informasi/data kriminal nasional pada system Piknas sesuai dengan fakta sesungguhnya terjadi, sehingga keabsahan informasi/data dapat di pertanggungjawabkan;

3) Terpercaya, dengan meningkatnya keakuratan informasi/data pada sistem Piknas, sehingga dapat dipercaya dan dijadikan rujukan data kriminal nasional.

4. **Misi Polri, Bareskrim Polri dan Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2023**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam penyusunan misi Polri, sama halnya dengan perumusan visi Polri, bahwa batasan operasional menjadi hal yang harus diperhatikan. Misi harus memberikan gambaran mengenai rumusan umum upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Terkait dengan hal tersebut, maka misi harus dapat menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas yang dibebankan oleh undang-undang terkait. Misi pun harus sejalan dengan upaya pencapaian visi dan berlaku pada periode tertentu. Oleh karena itu, misi Polri dijabarkan sebagai berikut:

"Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat".

Misi tersebut kemudian menjadi dasar bagi setiap satker dalam merumuskan misi dilingkungannya masing-masing, dengan menggambarkan tindakan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bareskrim Polri kemudian menetapkan misi sebagai berikut:

a. Mewujudkan .....

a. **Mewujudkan kepastian hukum;**

b. **Menciptakan rasa keadilan dengan menjunjung tinggi HAM;**

c. **Penyelidikan dan penyidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.**

Mengacu kepada misi Polri dan Misi Bareskrim Polri, maka Pusiknas Bareskrim Polri menetapkan misi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) **Mewujudkan layanan data dan informasi kriminal nasional yang *valid* dan terpercaya;**

2) **Meningkatkan integrasi pertukaran data antar satker Polri, penegak hukum dan Kementerian/Lembaga yang berwenang dalam penegakkan hukum.**

C **Tujuan Polri, Bareskrim Polri dan Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2023**

Rumusan mengenai tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Tujuan Polri pada periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan Polri Tahun 2023 :**

   a. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI;

   b. Menegakkan hukum secara berkeadilan;

   c. Mewujudkan Polri yang profesional;

   d. Modernisasi pelayanan Polri;

   e. Menerapkan manajemen Polri yang terintegritas dan terpercaya.

Dengan .....

Dalam rangka menjamin terwujudnya tujuan yang ditetapkan Polri, Bareskrim Polri sebagai bagian dari Satker dilingkungan Polri perlu untuk menjabarkan tujuan tersebut ke dalam dokumen renstra Bareskrim Polri. Sebagai bentuk upaya dalam menjabarkan tujuan Polri, Bareskrim Polri menjabarkan tujuan sebagai berikut:

2. Tujuan Bareskrim Polri Tahun 2023

a. Meningkatkan penyelesaian tindak pidana, baik konvensional, transnasional, merugikan kekayaan negara, dan kejahatan yang berinplikasi kontijensi;
b. Memberantas tindak pidana narkoba, korupsi, dan siber yang meresahkan masyarakat;
c. Menyelesaikan tata kelola Bareskrim yang transparan, akuntabel dan professional.

Berikut adalah tujuan yang disusun oleh Pusiknas Bareskrim Polri untuk mendukung pencapaian tujuan Polri dan Bareskrim Polri:

3. Tujuan Pusiknas Bareskrim PolriTahun 2023:

a. Pengembangan sistim big data terintegrasi menuju one data kriminal nasional;
b. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi skala enterprise guna peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi krimina nasional;
c. Penguatan kerjasama internal dan eksternal Polri;
d. Pemanfaatan sistem teknologi analitis pemutakhiran untuk mendukung penegakan hukum;
e. Penetapan standardisasi data kriminal nasional;
f. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pusiknas Bareskrim Polri;
g. Peningkatan sarana dan prasarana Pusiknas Bareskrim Polri;
h. Reformasi kelembagaan dan birokrasi Pusiknas Barskrim Polri;

i. Penguatan .....

i. Penguatan akuntabilitas kinerja Pusiknas Bareskrim Polri;

j. Penguatan regulasi dan pengawasan Pusiknas Bareskrim Polri.

D. Sasaran Strategis Polri, Bareskrim Polri dan Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2023.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan oleh Pusiknas Bareskrim Polri, yang memberikan *outcome* dari program yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pusiknas Bareskrim Polri. Untuk mencapai hal tersebut Pusiknas Bareskrim Polri menetapkan Sasaran Strategis yang diturunkan dari Sasaran Strategis Polri dan Sasaran Strategis Bareskrim Polri. Dalam merumuskan sasaran strategis di lingkungan Pusiknas Bareskrim Polri, ada beberapa kriteria yang ditetapkan, yaitu :

1. Sasaran Strategis Pusiknas Bareskrim Polri yang ditetapkan merupakan ukuran pencapaian dari tujuan Pusiknas Bareskrim Polri;
2. Sasaran Strategis mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari program yang ada di Pusiknas Bareskrim Polri;
3. Sasaran Strategis Pusiknas Bareskrim Polri yang dirumuskan, selaras dengan sasaran strategis yang ditetapkan Polri, sesuai dengan tugas dan fungsi Bareskrim, dan tetap sesuai dengan Visi, Misi;
4. Sasaran Strategis Pusiknas Bareskrim yang dirumuskan memiliki sebab akibat (*causality*) secara logis dengan sasaran strategis Polri;
5. Sasaran Strategis Pusiknas Bareskrim dirumuskan dengan jelas dan terukur;
6. Sasaran Strategis Pusiknas Bareskrim dilengkapi dengan indikator dan target.

Berikut .....

Berikut adalah sasaran setrategi Polri pada Renstra Tahun 2023 :

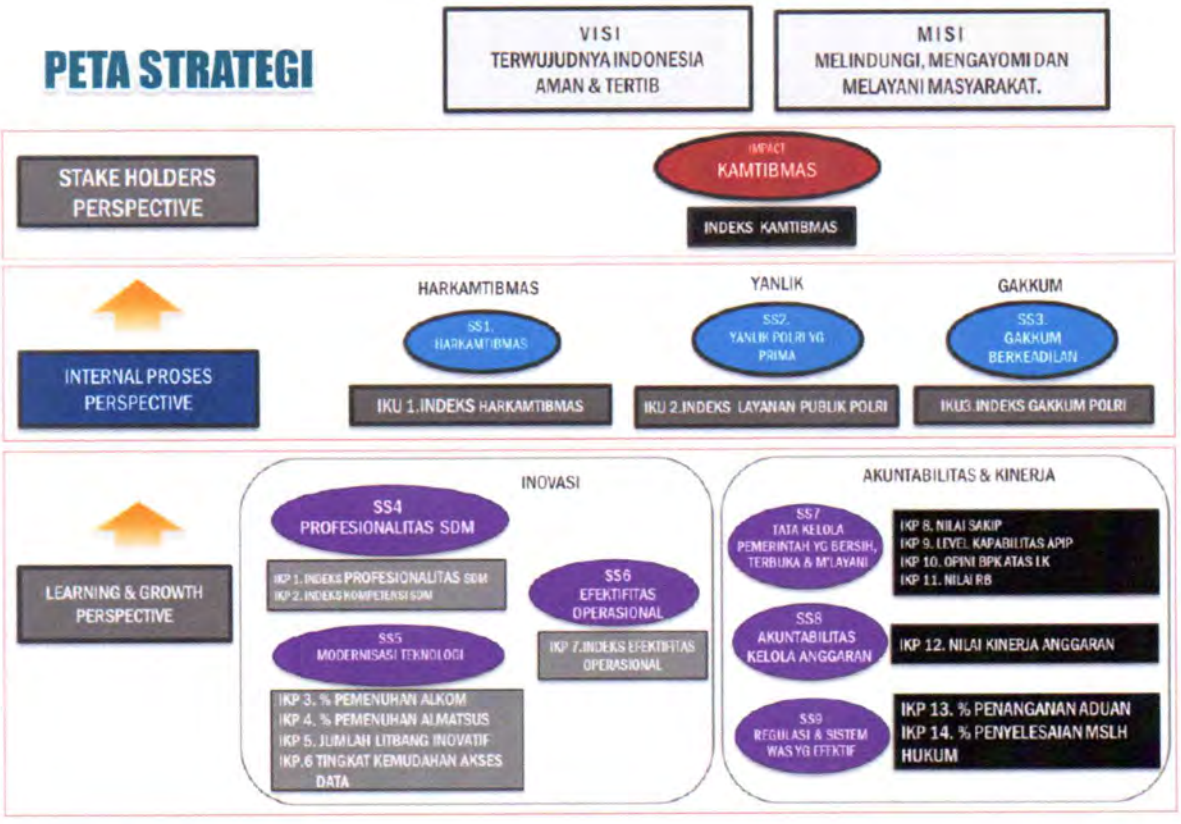

Impact (SI) yaitu "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat", adalah:

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Layanan publik Polri yang prima;
3. Penegakan hukum secara berkeadilan;
4. Profesionalisme SDM;
5. Modernisasi teknologi;
6. Efektifitas operasional;
7. Tata kelola pemerintah yang bersih, terbuka dan melayani;
8. Akutabilitas pengelolaan anggaran;
9. Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif.

Mengacu .....

Mengacu kepada sasaran Impact (SI) yaitu, "Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan", maka sasaran strategis Bareskrim Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatnya pelayanan publik dalam penegakkan hukum;
2. Terlaksananya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
3. Terselenggaranya pemantauan pengawasan terhadap barang bukti;
4. Terselenggaranya bantuan teknis lidik sidik;
5. Terwujudnya SDM Bareskrim yang kompeten;
6. Meningkatnya pemenuhan sarpras berbasis teknologi dan informasi;
7. Tersedianya data dan informasi yang handal dan *user friendly*;
8. Tata kelola pemerintah yang bersih, terbuka dan melayani;
9. Terkelolanya anggaran yang akuntabel;
10. Pengawasan dan pengendalian yang melibatkan masyarakat.

Sasaran strategis Bareskrim Polri Tahun 2023 tersebut digambarkan sebagai berikut:

Mengacu .....

Mengacu kepada sasaran Impact (SI) yaitu, "Tersedianya data dan informasi kriminal nasional yang handal dan *user friendly*", maka **sasaran strategis Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2023** adalah:

1. Tersedianya produk layanan data dan informasi kriminal nasional yang valid dan terpercaya;
2. Terselenggaranya pengembangan sistem Piknas yang modern;
3. Terselenggaranya sinergitas antar Kementrian/Lembaga dalam pengelolaan data kriminal nasional;
4. Terselenggaranya analisis data kriminal Nasional yang akurat;
5. Terselenggaranya standarisasi arsitektur dan pengelolaan data kriminal nasional;
6. Terwujudnya SDM Pusiknas Bareskrim Polri yang kompeten;
7. Meningkatnya pemenuhan Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Pusiknas Bareskrim Polri berbasis Teknologi dan Informasi";
8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Terbuka dan Melayani;
9. Terkelolanya anggaran Pusiknas Bareskrim Polri yang akuntabel;
10. Pengawasan pengendalian yang efektif.

Sasaran strategis Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2023 tersebut digambarkan sebagai berikut:

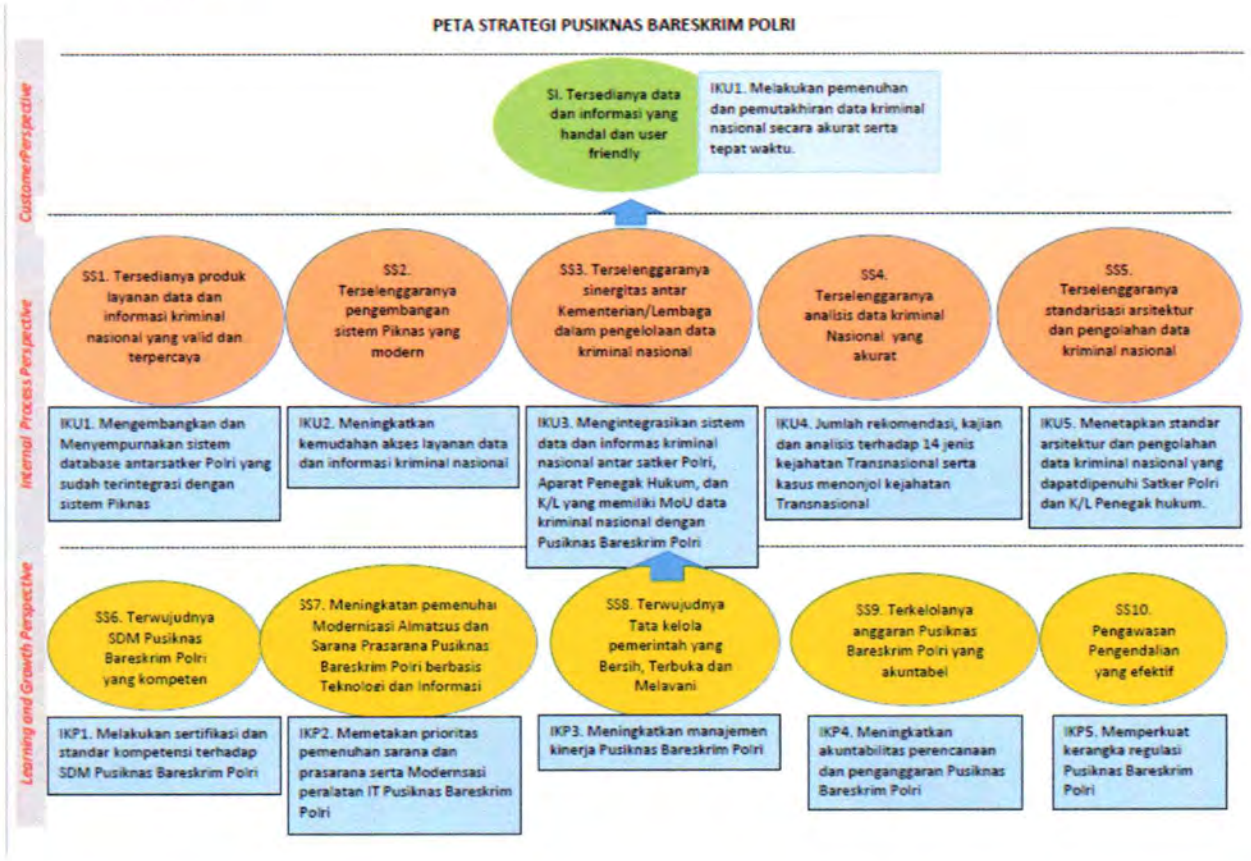

III. Arah .....

III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN 2023

A. Arah Kebijakan dan Strategi Polri Tahun 2023

Titik hubung dari sasaran, arah kebijakan dan strategis dalam agenda pembangunan ke-7, kedudukan Polri terletak pada Kegiatan Prioritas (KP) di:

1. Keamanan Dalam Negeri;
2. Keamanan Laut;
3. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan
4. Keamanan Siber.

Polri juga berkontribusi pada penegakan hukum yang berkaitan dengan *Restoratif Justice* dan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Sedangkan titik hubungnya dapat dilihat dari arah kebijakan dan strategi Polri hingga ke level Proyek Prioritas Nasional serta keterkaitannya dengan tugas dan fungsi yang dipunyai oleh Polri dapat digambarkan kedalam Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Polri.

Adapun Sasaran Strategis Polri Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis **"Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   a. Peningkatan kehadiran Polri pada 187 Lokasi Prioritas (Lokpri) dan 21 Pos Lintas Batas Negara (PLBN);

      Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

      1) Meningkatkan infrastruktur, SDM, dan pelayanan operasional Polri pada wilayah Lokasi Prioritas (Lokpri) dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
      2) Meningkatkan kegiatan pelacakan dan penangkalan terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN (darat dan laut).

2) Pencegahan .....

b. Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

1) Memetakan potensi terorisme, aksi radikal termasuk wanita dan anak-anak, konflik sosial, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
2) Melakukan Lidikpamgal dengan fokus kepada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
3) Meningkatkan efektivitas dan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya;
4) Memperkuat sistem manajemen pengamanan obyek vital nasional dan obyek vital lainnya.

c. Peningkatan Pelaksanaan Operasi Kepolisian;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

1) Menyiapkan kegiatan operasi, meningkatkan kemampuan personel operasi dan melaksanakan supervisi operasi;
2) Menyiapkan kegiatan operasi sebelum, saat dan pasca pemindahan Ibu Kota Negara.

d. Peningkatan keamanan Laut;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

1) Meningkatkan patroli perairan dan udara dalam mendeteksi dan mengungkap kejahatan di laut;

2) Memberdayakan .....

2) Memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut;
3) Meningkatkan Penegakkan Hukum diwilayah perairan NKRI.

e. Peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

1) Meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin dalam berlalu lintasdijalan raya;
2) Peningkatan kualitas Penerangan dan Pendidikan tertib lalu lintas;
3) Mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintasdari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri.

f. Peningkatan desa/kelurahan sadar Kamtibmas.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

1) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2) Menggerakkan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
3) *Partnership* potensi masyarakat sadar Kamtibmas dalam cegah tangkal Kamtibmas mengoptimalkan dan menerapkan pendekatan "keadilan restoratif serta peran mediasi" setiap konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas.

b. Sasaran .....

2. Sasaran strategis **"Layanan publik Polri yang prima"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat.

   Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

   a. Meningkatkan inovasi pelayanan publik Polri;
   b. Meningkatkan pelayanan data dan informasi Kriminal Nasional melalui Akses yang mudah;
   c. Meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

3. Sasaran strategis **"Penegakan Hukum secara Berkeadilan"** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

   a. Peningkatan pengungkapan 4 jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;

      Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri yang akan dilakukan adalah:

      1) Meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
      2) Melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
      3) Meningkatkan kerjasama internasional dibidang penyelidikan dan penyidikan;
      4) Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkaratindak pidana 4 jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik.
      5) Peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation).

   b. Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional;

      Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri yang akan dilakukan adalah:

      1) Mengintegrasikan sistem data dan informasi criminal antarsatker Polri dan aparat penegak hukum;

2) Standarisasi .....

2) Standarisasi data kriminal nasional;
3) Mengembangkan sistem informasi criminal nasional yang terintegrasi.

c. Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

1) Memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
2) Melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.

4. Sasaran strategis **"Profesionalisme SDM"** dicapai dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas SDM Polri

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

1) Melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional;
2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri;
3) Meningkatkan kesejahteraan SDM.

b. Pemindahan personel Polri ke Ibu Kota Negara baru.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

1) Melakukan pendataan personel Mabes Polri yang akan pindah ke Ibu Kota Negara baru;
2) Menyusun roadmap pemindahan personel Mabes Polri ke Ibu Kota Negara baru.

e. Sasaran .....

5. Sasaran strategis **"Modernisasi teknologi"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Modernisasi Sarana dan Prasarana Polri.

   Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

   a. Memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana 2020-2024 termasuk kebutuhan di Ibu Kota Negara baru;
   b. Modernisasi Sarana dan Prasarana operasional guna mendukung pelayanan Polri;
   c. Modernisasi kapal kelas A-1 dengan ukuran Panjang 90-95 M dan Unmanned Aerial Vehicle (UAV)-Drone;
   d. Membangun Big Data/Single Data Entry Polri;
   e. Membangun smart security di Ibu Kota Negara baru.

6. Sasaran strategis **"Efektifitas operasional"** dicapai dengan kebijakan sebagai berikut:

   a. Peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polri.

      Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri yang akan dilakukan adalah:

      1) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;
      2) Mengembangkan Manajemen Operasi Kepolisian (Perencanan, Pelaksanaan dan Pengawasan).

   b. Peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen Media.

      Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri yang akan dilakukan adalah:

      1) Mengelola media konvensional dan media digital secara efektif dalam membangun kepercayaan publik;
      2) Menetralisir berita negatif yang dapat mengganggu Kamtibmas.

c. Penguatan .....

c. Penguatan Sistem Informasi Polri berbasis "Big Data Polri".
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri yang akan dilakukan adalah:
1) Melakukan pemutakhiran data kepolisian secara akurat dan tepat waktu;
2) Mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri;
3) Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil Litbang Polri.

7. Sasaran strategis **"Good governance dan clean government"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut : Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Polri
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:
a. Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal;
b. Membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
c Meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polsek.

8. Sasaran strategis **"Akuntabilitas pengelolaan anggaran"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
a. Penguatan akuntabilitas kinerja Polri.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:
1) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Polri;
2) Menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu anggaran Polri.
b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri.

Untuk .....

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

1) Menyusun dan menyiapakan dokumen perencanaan Polri;
2) Menyusun LKIP Polri.

9. Sasaran strategis **"Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Penguatan regulasi Polri

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

a. Memperkuat kerangka regulasi Polri;
b. Memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Bareskrim Tahun 2023

1. Sasaran strategis **"Terwujudnya Penegakkan hukum secara berkeadilan"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Peningkatan pengungkapan 4 jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Polri yang akan dilakukan adalah:

1) Meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
2) Melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
3) Meningkatkan kerjasama internasional dibidang penyelidikan dan penyidikan;
4) Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi publik.

5) peningkatan .....

5) peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*).

b. Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Bareskrim Polri yang akan dilakukan adalah:

1) Mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum;
2) Standarisasi data kriminal nasional;
3) Mengembangkan sistem informasi kriminal nasional yang terintegrasi.

c. Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah:

1) Memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/ penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;
2) Melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.

2. Sasaran strategis **"Meningkatnya pelayanan publik dalam penegakan hukum"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat;

Untuk .....

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:

a. Meningkatkan inovasi pelayanan Polri;
b. Meningkatkan pendekatan personal dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Sasaran strategis **"Terlaksananya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Peningkatan pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana secara transparan;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:

a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum;
b. Meningkatkan kerjasama internasional dibidang penyelidikan dan penyidikan;
c. Mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara pidana 4 jenis kejahatan dan terorisme yang menjadi atensi *public*;
d. Melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri.

4. Sasaran strategis **"Terselenggaranya pemantauan pengawasan terhadap barang bukti"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Akuntabilitas tahanan dan barang bukti;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:

a. Transparansi pengelolaan barang bukti;
b. Melaksanakan perawatan tahanan yang sesuai aturan.

5. Sasaran strategis **"Terselenggaranya bantuan lidik sidik"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Peningkatan pengungkapan kasus melalui pembuktian ilmiah;

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:

1. Melengkapi peralatan laboratorium forensik dengan teknologi terkini.
2. Meningkatkan cakupan data identitas forensik kependudukan.
3. Peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis dalam pengolahan tempat kejadian perkara (*Crime Scene Investigation*).

b. Pemberian bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan bantuan pembinaan terhadap PPNS Kementerian Lembaga.

6. Sasaran strategis **"Terwujudnya SDM Bareskrim yang kompeten"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Peningkatan kualitas SDM Bareskrim Polri;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:

a. Melakukan reformasi pengelolaan SDM secara professional;
b. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan Polri;
c. Meningkatkan kesejahteraan SDM;

7. Sasaran strategis **"Meningkatnya pemenuhan sarpras berbasis teknologi dan informasi"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Modernisasi sarana dan prasarana Bareskrim Polri;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:

a. Memetakan prioritas dan kebutuhan sarana dan prasarana;
b. Modernisasi Sarana dan Prasaran operasional dan pelayanan Bareskrim Polri.

8. Sasaran strategis **"Tersedianya data dan informasi yang handal dan *user friendly*"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Penguatan sistem informasi Bareskrim Polri berbasis *big data*;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:
   a. Melakukan pemutakhiran data Bareskrim secara akurat dan tepat waktu;
   b. Mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan.

9. Sasaran strategis **"terwujudnya *good governance* dan *clean government*"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Bareskrim Polri;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:
   a. Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Bareskrim Polri yang andal;
   b. Membangun sistem yang memastikan penerapan nilai-nilai dan kode etik Polri;
   c. Meningkatkan manajemen kinerja Bareskrim Polri dari tingkat Mabes sampai dengan Polsek.

10. Sasaran strategis **"Terkelolanya anggaran yang akuntabel"** dicapai dengan arah kebijakan sebaia berikut: Penguatan akuntabilitas kinerja Bareskrim Polri;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Bareskrim Polri.

11. Sasaran .....

11. Sasaran strategis **"pengawasan pengendalian yang melibatkan peran masyarakat"** dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: Penguatan pengawasan di lingkungan Bareskrim Polri;

    Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi pembangunan Bareskrim Polri yang dilakukan adalah:

    a. Memperkuat pengawasan terhadap penyidik tindak pidana di Bareskrim Polri;
    b. Memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi hukum secara efektif.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2023

Berikut adalah arah bijak dan strategi Pusiknas Bareskrim Polri yang diturunkan dari sasaran strategi :

1. Sasaran strategis "**Terselenggaranya produk layanan data informasi kriminal nasional yang valid dan terpercaya** dicapai dengan arah bijak Pengembangan sistem *big data* terintegrasi menuju *one data* kriminal nasional

   Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah meningkatnya kemudahan akses layanan data dan informasi kriminal nasional.

2. Sasaran strategis "**Terselenggaranya pengembangan sistem Piknas yang modern**" dicapai dengan arah bijak Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi skala *enterprise* guna peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kriminal

   Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah mengembangkan dan menyempurnakan sistem database satker Polri yang sudah terintegrasi dengan sistem Piknas.

3. Sasaran .....

3. Sasaran strategis "**Terselenggaranya sinergitas antar Lembaga dalam pengelolaan data kriminal nasional**" dicapai dengan arah bijak Penguatan kerjasama internal dan eksternal Polri

   Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah Mengintegrasikan data kriminal nasional dengan Satker Polri, Aparat Penegak Hukum, dan K/L yang memiliki MOU data kriminal nasional dengan Pusiknas Bareskrim Polri.

4. Sasaran strategis "**Terselenggaranya analisis data kriminal nasional yang akurat**" dicapai dengan arah bijak Pemanfaatan sistem teknologi analitis pemutakhiran untuk mendukung penegakan hukum

   Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah Jumlah rekomendasi, kajian dan analisa terhadap 14 jenis kejahatan Transnasional serta kasus menonjol kejahatan transnasional.

5. Sasaran strategis "**Terselenggaranya standardisasi arsitektur dan pengelolaan data kriminal nasional**" dicapai dengan arah bijak Penetapan standardisasi data kriminal nasional

   Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah Menetapkan standar arsitektur dan pengolahan data kriminal nasional yang dapat dipenuhi Satker Polri dan K/L penegak hukum.

6. Sasaran strategis "**Terwujudnya SDM Pusiknas yang kompeten**" dicapai dengan arah bijak Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pusiknas Bareskrim Polri

   Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah melakukan sertifikasi dan standar kompetensi terhadap SDM Pusiknas Bareskrim Polri.

7. Sasaran .....

7. Sasaran strategis **"Meningkatnya pemenuhan Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Pusiknas Bareskrim Polri berbasis Teknologi dan Informasi"** dicapai dengan arah bijak Peningkatan sarana dan prasarana Pusiknas Bareskrim Polri
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah memetakan prioritas pemenuhan sarana dan prasarana serta Modernisasi peralatan IT Pusiknas Bareskrim Polri.

8. Sasaran strategis "**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Terbuka dan Melayani**" dicapai dengan arah bijak Reformasi kelembagaan dan birokrasi Pusiknas Barskrim Polri
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah meningkatkan manajemen kinerja Pusiknas Bareskrim Polri.

9. Sasaran strategis "**Terkelolanya anggaran Pusiknas Bareskrim Polri yang akuntabel**" dicapai dengan arah bijak Penguatan akuntabilitas kinerja Pusiknas Bareskrim Polri
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Pusiknas Bareskrim Polri.

10. Sasaran strategis "**Pengawasan pengendalian yang efektif**" dicapai dengan arah bijak Penguatan regulasi dan pengawasan Pusiknas Bareskrim Polri
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang dilakukan adalah memperkuat kerangka regulasi Pusiknas Bareskrim Polri

IV. PROGRAM KEGIATAN DAN PAGU ALOKASI T.A. 2023

A. Program Dan Kegiatan

1. 060.01.B1 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

   a. Kegiatan 3137 – Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, dengan out put kegiatan:

      1) 3137.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal, 3137.EBA.007 Layanan Dukungan Manajemen Lidik Sidik dengan Komponen 003 Dukungan Operasional Pertahanan Dan Keamanan sebagai berikut:

         a) sub komponen AD – Rapat rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/Kelompok Kerja/Konsultasi, didukung anggaran sebesar Rp. 49.890.000,-;

         b) sub komponen DW – pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian, didukung anggaran sebesar Rp. 55.696.000.-.

         c) sub komponen E – Penyusunan Program, Anggaran Dan Rencana Kerja, didukung anggaran sebesar Rp. 7.267.000.-;

         d) sub komponen F – Penyusunan RKA-KL, dan DIPA, didukung anggaran sebesar Rp.142.764.000.-;

         e) sub komponen G – penyusunan dan evaluasi LKIP, didukung anggaran sebesar Rp. 27.629.000.-;

         f) sub komponen I – penyusunan naskah buku lainnya, didukung anggaran sebesar Rp. 61.425.000.-;

2) 3137.EBA .....

2) 3137.EBA.994 Layanan Perkantoran

a) 001 Gaji dan tunjangan dengan sub komponen A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan di dukung anggaran sebesar Rp. 6.316.412.000,-;

b) 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

(1) sub komponen BW – Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor, didukung anggaran sebesar Rp.142.672.000.-

3) 5084 Penyelenggaraan Informasi Kriminal Nasional, dengan Klasifikasi Rincian Output (KRO) 5084.BMA Data Dan Informasi Publik, Rincian Output (RO) 5084.BMA.001 Penyajian Informasi Kriminal Nasional, Komponen 003 Dukungan Operasional Pertahanan Dan Keamanan sebagai berikut:

a) sub komponen AD – Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/pimpinan Kelompok kerja/Konsultasi didukung anggaran sebesar Rp. 682.412.000.-;

b) Sub komponen AM – Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan, didukung anggaran sebesar Rp. 449.380.000.-;

c) sub komponen DP – Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja didukung anggaran sebesar Rp. 44.120.000.-;

d) sub komponen ER – Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembga Terkait , didukung anggaran sebesar Rp. 195.840.000.-;

e) sub komponen FS – Dukungan Operasional Satker, didukung anggaran sebesar Rp. 721.557.000.-

2. 060.01. BP.....

2. 060.01.BP Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri, dengan kegiatan 5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras menggunakan Klasifikasi Rincian Output (KRO) 5059.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal, Rincian Output (RO) 5059.EBA.994 Layanan Perkantoran, Komponen 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebagai berikut

   a Sub komponen AY – pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4/6/10, didukung anggaran sebesar Rp. 388.000.000.-;

   b. Sub komponen BB – pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2, didukung anggaran sebesar Rp. 73.500.000.-;

   c. Sub komponen BH – pemeliharaan peralatan kantor perawatan peralatan fungsional, didukung anggaran sebesar Rp. 89.230.000.-;

   d. Sub komponen BI – pemeliharaan peralatan fungsional, didukung anggaran sebesar Rp. 7.290.156.000.-;

   e Sub komponen BR – Sewa jaringan telekomunikasi (leased channel) Satelit didukung anggaran sebesar Rp. 669.900.000.-.

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2023 ini disusun, disesuaikan dengan alokasi pagu Indikatif dan sasaran kegiatan prioritas serta arah kebijakan Kabareskrim Polri dan Kapusiknas Bareskrim Polri

Jakarta, 21 Juli 2022

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

HERU DWI PRATONDO, S.H.,M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLRI TAHUN 2023
PUSIKNAS BARESKRIM POLRI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	KETERANGAN
	Internal Process Perspective			
1	SS1 Tersedianya produk layanan data dan informasi kriminal nasional yang valid terpercaya	IKU1 Meningkatkan kemudahan akses layanan data dan informasi kriminal nasional	1521 Laporan	
2	SS2 Terselenggaranya pengembangan sistem Piknas yang modern	IKU2 Mengembangkan dan menyempurnakan sistem database antar satker Polri yang sudah terintegrasi dengan system Piknas	182 Laporan	
3	SS3 Terselenggaranya sinergitas antar Lembaga dalam pengelolaan data kriminal nasional	IKU3 Mengintegrasikan data kriminal nasional dengan Satker Polri, Aparat Penegak Hukum, dan K/L/yang memiliki MoU data kriminal nasional dengan Pusiknas Bareskrim Polri	3 K/L	
4	SS4 Terselenggaranya analisis data kriminal Nasional yang akurat	IKU4 Jumlah rekomendasi, kajian dan analisis terhadap 14 jenis kejahatan Transnasional serta kasus menonjol kejahatan transnasional	150 Laporan	
5	SS5 Terselenggaranya standarisasi arsitektur dan pengolahan data kriminal nasional	IKU5 Menetapkan standar arsitektur dan pengolahan data kriminal nasional yang dapat dipenuhi Satker Polri dan K/L penegak hukum	40 %	
	Learning and Growth Perspective			
6	SS6 Terwujudnya SDM Pusiknas yang kompeten	IKP1 Melakukan sertifikasi dan standar kompetensi terhadap SDM Pusiknas Bareskrim Polri	8 %	
7	SS7 Meningkatnya pemenuhan sarpras Pusiknas Bareskrim Polri berbasis teknologi dan informasi	IKP2 Memetakan prioritas pemenuhan sarana dan prasarana serta Modernisasi peralatan IT Pusiknas Bareskrim Polri	40 %	
8	SS8 Terwujudnya Tata kelola pemerintah yang bersih, terbuka dan melayani	IKP3 Meningkatkan manajemen kinerja Pusiknas Bareskrim Polri	BB	
9	SS9 Terkelolanya anggaran Satker Pusiknas Bareskrim Polri yang akuntabel	IKP4 Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Pusiknas Bareskrim Polri	95 %	
10	SS10 Pengawasan pengendalian yang efektif	IKP5 Memperkuat kerangka regulasi Pusiknas Bareskrim Polri	100 %	

Jakarta, 21 Juli 2022

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

HERU DWI PRATONDO, S.H., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

TABEL RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023
PUSIKNAS BARESKRIM POLRI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET				TOTAL TARGET	LANGKAH LANGKAH	PENANGGUNG JAWAB
				TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5				6	7	8
	Internal Process Perspective									
1	SS1 Tersedianya produk layanan data dan informasi kriminal nasional yang valid terpercaya	IKU1 Meningkatkan kemudahan akses layanan data dan informasi kriminal nasional;	=(Jumlah produk layanan informasi yang menjadi bahan kebijakan / Jumlah seluruh produk layanan informasi)*100%	320	400	320	481	1521 Laporan	a. Pembayaran gaji dan tunjangan; (komponen utama); pembayaran gaji, lembur, Honorarium dan Vakasi kepada seluruh personel Pusiknas Bareskrim Polri di laksanakan pada setiap bulannya secara rutin selama 12 bulan, ditambah dengan adanya Tunjangan Kinerja yang telah dibayarkan setiap bulannya selain itu pada pertengahan tahun akan di berikan gaji ke 13 dan Gaji ke 14 (THR), dan Tunjangan Kinerja ke 13 dan Ke 14 kepada seluruh personel Pusiknas Bareskrim Polri. Dalam setiap bulannya PNS mendapatkan uang makan yang terpisah dengan gaji dan di bayarkan setiap bulan sekali secara rutin. Kegiatan personel yang melaksanakan tugasnya melebihi jam kerja akan di berikan uang lembur sesuai	KAPUSIKNAS BARESKRIM POLRI
2	SS2 Terselenggaranya pengembangan sistem Piknas yang modern	IKU2 Mengembangkan dan menyempurnakan sistem database antar satker Polri yang sudah terintegrasi dengan system Piknas;	=(Jumlah sistem Iknas yang sesuai dengan perencanaan saat ini / jumlah kebutuhan seluruh sistem Iknas)*100%	42	42	49	56	182 Laporan		
3	SS3 Terselenggaranya sinergitas antar Lembaga dalam pengelolaan data kriminal nasional	IKU3 Mengintegrasikan data kriminal nasional dengan Satker Polri, Aparat Penegak Hukum, dan K/L/yang memiliki MoU data kriminal nasional dengan Pusiknas Bareskrim Polri ;	=(Jumlah Satker Polri yang sudah terintegrasi dengan Pusiknas / jumlah seluruh Satker Polri)*100%	-	1	1	1	3 K/L		
4	SS4 Terselenggaranya analisis data kriminal Nasional yang akurat	IKU4 Jumlah rekomendasi, kajian dan analisis terhadap 14 jenis kejahatan Transnasional serta kasus menonjol kejahatan transnasional;	=(Jumlah dokumen hasil analisis dan evaluasi yang digunakan / jumlah seluruh dokumen analisis dan evaluasi)*100%	37	37	38	38	150 Laporan	b. Pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 untuk Pejabat Eselon II 1 (satu) unit dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 sebanyak 14 (empat belas) dilaksanakan agar usia pakai dapat berlangsung lama sehingga dapat menjamin kelancaran tugas rutin pimpinan dan staf di satker Pusiknas Bareskrim Polri yang pemeliharaannya dilaksanakan oleh pihak ketiga;	
5	SS5 Terselenggaranya standarisasi arsitektur dan pengolahan data kriminal nasional	IKU5 Menetapkan standar arsitektur dan pengolahan data kriminal nasional yang dapat dipenuhi Satker Polri dan K/L penegak hukum;	=(Jumlah standar data kriminal nasional yang ditetapkan sebagai peraturan / jumlah standar data kriminal nasional)*100%	10,0	10,0	10,0	10,0	40%		

Learning .....

1	2	3	4	5				6	7	8
	Learning and Growth Perspective									
6	SS6 Terwujudnya SDM Pusiknas yang kompeten	IKP1 Melakukan sertifikasi dan standar kompetensi terhadap SDM Pusiknas Bareskrim Polri;	=(Jumlah SDM Pusiknas yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan kejuruan / jumlah seluruh SDM Pusiknas	2	2	2	2	8%	c. Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 21 (dua puluh satu) unit dilaksanakan agar usia pakai kendaraan tersebut dapat berlangsung lama sehingga dapat menjamin kelancaran tugas rutin operasional di satker Pusiknas Bareskrim Polri yang pemeliharaannya dilaksanakan oleh pihak ketiga;	
7	SS7 Meningkatnya pemenuhan sarpras Pusiknas Bareskrim Polri berbasis teknologi dan informasi	IKP2 Memetakan prioritas pemenuhan sarana dan prasarana serta Modernisasi peralatan IT Pusiknas Bareskrim Polri;	=(Jumlah sarpras yang dimiliki Pusiknas / jumlah seluruh kebutuhan sarpras Pusiknas Polri)*100%	10,0	10,0	10,0	10,0	40%	d. Pemeliharaan peralatan kantor, dilaksanakan agar peralatan kantor dapat terus terpelihara dengan baik sehingga kegiatan tugas dapat berjalan dengan lancar berupa biaya perawatan mesin Foto copy, pemeliharaan perbaikan computer dan note book, perbaikan dan perawatan printer yang pemeliharaannya dilaksanakan oleh pihak ketiga;	
8	SS8 Terwujudnya Tata kelola pemerintah yang bersih, terbuka dan melayani	IKP3 Meningkatkan manajemen	Dinilai oleh instansi lain	BB	BB	BB	BB	BAIK SEKALI	e. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan system Piknas dan Sistem CMIS dilaksanakan agar daya guna peralatan tersebut dapat berlangsung lama sehingga penginputan data kriminal dan lalu lintas dapat berjalan dengan lancar.	
9	SS9 Terkelolanya anggaran Satker Pusiknas Bareskrim Polri yang akuntabel	IKP4 Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Pusiknas Bareskrim Polri;	Dinilai oleh instansi lain	23,75	23,75	23,75	23,75	95,00%	f. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran; (komponen utama); Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor:	
10	SS10 Pengawasan pengendalian yang efektif	IKP5 Memperkuat kerangka regulasi Pusiknas Bareskrim Polri;	=(Jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan external yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rekomendasi)*100%	25	25	25	25	100%	Untuk mendukung kegiatan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari alat tulis kantor (ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/rnajalah, dan air minum pegawai, bahan baku computer dan bahan baku foto copy yang pelaksanaannya di laksanakan oleh pihak ketiga.	

g. Untuk .....

1	2	3	4	5	6	7	8
						g. Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pusiknas Bareskrim Polri perlunya Penyusunan Program, anggaran dan Rencana Kerja yang didahului dengan menyusun **Penyusunan Program Dan Rencana Kerja** dengan kegiatan 1) Menyusun Rancangan Rencana Kerja TA. 2023 dengan kegiatan rapat penyusunan kebutuhan dan anggaran ideal yang dihimpun dari Para Kabid, Kasubbag, Kaurkeu dan Kaurtu di lingkungan Pusiknas Bareskrim Polri sebagai kebutuhan ideal yang diinginkan Pusiknas Bareskrim Polri sebagai masukan ke Asrena Kapolri dan Kementrian Keuangan RI. 2) Menyusun Rencana Kerja TA. 2023 disusul kemudian dengan Menyusun Renbut Pagu Ideal TA. 2023. Menyusun Pagu Indikatif TA. 2023, Menyusun Pagu Difinitif TA. 2023, Menyusun Alokasi Anggaran TA. 2023 Pusiknas Bareskrim Polri TA. 2023; h. Setelah Penyusunan Program, Anggaran dan Rencana Kerja telah selesai maka salanjutnya **Penyusunan RKA-KL dan DIPA** yang masuk dalam subkomponen tersebut yaitu : Menghadiri kegiatan fungsi perencanaan (Rapat Hibah, Menysusun DIPA, Menyusun Anev Polri dll), Penyusunan Pagu Ideal TA. 2023, Penyusunan Pagu Indikatif TA. 2023, Penyusunan Pagu Definitif/Anggaran TA. 2023, Penyusunan Alokasi Anggaan TA. 2023, Penyusunan Norma Indek Pusiknas Bareskrimn Polri TA. 2023 sebagai pedoman untuk estimasi biaya yang tidak di atur dalam PMK;	

i. Penyusunan .....

1	2	3	4	5				6	7	8
									i. **PENYUSUNAN DAN EVALUASI LKIP**, dalam kegiatan penyusunan LKIP ini disusun terlebih dahulu rencana dan menghimpun data untuk mengkonfirmasikan sejauh mana pencapaian keberhasilan kinerja Pusiknas Bareskrim Polri dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan Rencana Kegiatan TA. 2022 dan Perjanjian Kinerja TA. 2022 yang sudah berjalan dengan membandingkan antara Perjanjian kinerja dengan capaian kinerja dengan data yang dihimpun dari Ses dan para Kabid, Subbag, urtu dan Kaurkeu di lingkungan Adapun tujuan disusunnya laporan ini untuk memberikan laporan pertanggung jawaban pengguna anggaran dan sebagai bahan masukan kepada Pimpinan untuk di kaji dan di analisa dalam rangka penyempurnaan sasaran Renja selanjutnya sehingga sasaran dapat dicapai secara maksimal; j. Adapun kegiatan yang masuk dalam Subkomponen **PENYUSUNAN DAN EVALUASI LKIP** sebagai berikut: Penyusunan LKIP T.A. 2022, Penyusunan Rencana Kegiatan T.A. 2023, Penyusunan Perjanjian Kinerja T.A. 2023, Pengimputan SMAP Off Line dan Online, Monev DJA dan Penyusunan Anev Kinerja Pusiknas Bareskrim Polri; k. Penyusunan naskah buku lainnya, yang masuk dalam Subkomponen ini adalah kegiatan Penyusunan Standarisasi Data Kriminal Nasional, Penyusunan lanjutan Revisi dan Pengkajian Perkap Sistem Piknas, Penyusunan Revisi dan Pengkajian SOTK Pusiknas Barekrim Polri, dan Penyusunan Standart Kompetensi Kinerja Jabatan Fungsional (SK-3) Pusiknas Bareskrim serta tugas lain yang di berikan dari pimpinan berkaitan dengan fungsi Pusiknas Bareskrim Polri;	

1	2	3	4	5	6	7	8
						l. Rapat rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/ Kelompok/Kerja/ Konsultasi dalam kegiatan utama melaksanakan kegiatan rapat rutin yang berkaitan dengan tugas Pokok dan Fungsi Pusiknas Bareskrim Polri dalam rangka mencapai visi dan misi Pusiknas Bareskrim Polri. m Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian berupa penataan administrasi personel Pusiknas Bareskrim Polri dan penataan adminitrasi SIMAK BMN Pusiknas Bareskrim Polri, administrasi pertanggung jawaban keuangan dan administrasi laporannya harus sesuai dengan peraturan; n Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan merupakan kegiatan rutin bidang keuangan (Kaurkeu) yang melaksanakan tugas-tugas pembayaran hak-hak Anggota Polri, pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan kepada KPA, PPK, Pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM, Bendahara pengelola kekuangan, kegiatan ke KPPN, Kegiatan ke kantor pajak, Staf keuangan, Pejabat pengadaan barang jasa dan pejabat pemeriksa/penerima barang, administrasi pertanggung jawabannya keuangannya harus benar sesuai dengan peraturan; o Kerjasama antar instansi pemerintah swasta/lembaga Pusat Informasi kriminal Nasional merupakan institusi yang menghimpun data kriminal dan lalu lintas sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, data kriminal bukan hanya terdapat di Kepolisian saja tetapi terdapat pula di instansi yang ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pusiknas perlu melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait untuk menghimpun data kriminal dan satuan kerja di Kepolisian seperti Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Koorlantas Polri dan satker terkait lainnya untuk mendukung kelancaran tugas Pusiknas Bareskrim Polri.	

p. Dukungan .....

1	2	3	4	5				6	7	8
									p Dukungan operasional satker agar telaksanaya tugas pokok fungsi Pusat Informasi Kriminal Nasional sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lampiran XVIII : Bareskrim Polri); antara lain melaksanakan : 1) Terdukungnya kegiatan sehari hari Kapusiknas Bareskrim Polri dan Ses Pusiknasn Bareskrim Polri dalam menjalankan roda Organisasi dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pusiknas Bareskrim Polri. 2) Pelayanan Informasi Kriminal Nasional : a) Penyusunan Jurnal Data Kriminal Nasional Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2023 b) Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan - Penyusunan laporan Anev data lalulintas - Penyusunan laporan Anev data kriminal dengan sistem Piknas - Penyusunan laporan Anev data - Penyusunan lap. input SPPT ber basis IT - Penyusunan lap. LP yg di input oleh PPNS	

3) Pengembangan .....

1	2	3	4	5				6	7	8
									3) Pengembangan Sistem a) Penyusunan laporan bulanan Monitoring Aplikasi Sistem Pusiknas b) Penyusunan laporan bulanan Monitoring perangkat sistem Pusiknas c) Penyusunan laporan tahunan Monitoring perangkat sistem Pusiknas d) Penyusunan laporan tahunan Monitoring Aplikasi Sistem Pusiknas 4) Pusat Data Analisa Kejahatan a) Penyusunan Laporan Bulanan 14 jenis kejahatan Transnasional (terorisme, narkotika, penyelundupan manusia, perdagangan orang, pariwisata sex anak, pencucian uang, korupsi, siber, pembalakan hutan, penangkapan ikan illegal, penambangan liar, penyelundupan senjata api, hak kekayaan intelektual, dan perbankan) b) Penyusunan Laporan Bulanan 14 jenis kejahatan Transnasional (terorisme, narkotika, penyelundupan manusia, perdagangan orang, pariwisata sex anak, pencucian uang, korupsi, siber, pembalakan hutan, penangkapan ikan illegal, penambangan liar, penyelundupan senjata api, hak kekayaan intelektual, dan perbankan)	

c) Penyusunan .....

1	2	3	4	5				6	7	8
									c) Penyusunan Laporan Anev Triwulanan 14 jenis kejahatan Transnasional (terorisme, narkotika, penyelundupan manusia, perdagangan orang, pariwisata sex anak, pencucian uang, korupsi, siber, pembalakan hutan, penangkapan ikan illegal, penambangan liar, penyelundupan senjata api, hak kekayaan intelektual, dan perbankan) d) Penyusunan Laporan Anev Semester 14 jenis kejahatan Transnasional (terorisme, narkotika, penyelundupan manusia, perdagangan orang, pariwisata sex anak, pencucian uang, korupsi, siber, pembalakan hutan, penangkapan ikan illegal, penambangan liar, penyelundupan senjata api, hak kekayaan intelektual, dan perbankan) e) Penyusunan Laporan Anev Tahunan 14 jenis kejahatan Transnasional (terorisme, narkotika, penyelundupan manusia, perdagangan orang, pariwisata sex anak, pencucian uang, korupsi, siber, pembalakan hutan, penangkapan ikan illegal, penambangan liar, penyelundupan senjata api, hak kekayaan intelektual, dan perbankan)	

f) Rapat .....

1	2	3	4	5				6	7	8
									f) Rapat Sinkronisasi dan Validasi Data 14 jenis kejahatan Transnasional (terorisme, narkotika, penyelundupan manusia, perdagangan orang, pariwisata sex anak, pencucian uang, korupsi, siber, pembalakan hutan, penangkapan ikan illegal, penambangan liar, penyelundupan senjata api, hak kekayaan intelektual, dan perbankan)	

Jakarta, 21 Juli 2022

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

HERU DWI PRATONDO, S.H., M.M.

BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLR
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

SASARAN PRIORITAS, ARAH BIJAK & STRATEGI
RENJA PUSIKNAS BARESKRIM POLRI T.A 2023

NO	SASARAN PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET
1	Terselenggaranya produk layanan data informasi kriminal nasional yang valid dan terpercaya	Pengembangan sistem *big data* terintegrasi menuju *one data* kriminal nasional	meningkatnya kemudahan akses layanan data dan informasi kriminal nasional.	1521 Laporan
2	Terselenggaranya pengembangan sistem Piknas yang modern	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi skala *enterprise* guna peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kriminal	mengembangkan dan menyempurnakan sistem database satker Polri yang sudah terintegrasi dengan sistem Piknas.	182 Laporan
3	Terselenggaranya sinergitas antar Lembaga dalam pengelolaan data kriminal nasional	Penguatan kerjasama internal dan eksternal Polri	Mengintegrasikan data kriminal nasional dengan Satker Polri, Aparat Penegak Hukum, dan K/L yang memiliki MOU data kriminal nasional dengan Pusiknas Bareskrim Polri.	3 K/L
4	Terselenggaranya analisis data kriminal nasional yang akurat	Pemanfaatan sistem teknologi analitis pemutakhiran untuk mendukung penegakan hukum	Jumlah rekomendasi, kajian dan analisa terhadap 14 jenis kejahatan Transnasional serta kasus menonjol kejahatan transnasional	150 Laporan
5	Terselenggaranya standardisasi arsitektur dan pengelolaan data kriminal nasional	Penetapan standardisasi data kriminal nasional	Menetapkan standar arsitektur dan pengolahan data kriminal nasional yang dapat dipenuhi Satker Polri dan K/L penegak hukum	40 %
6	Terwujudnya SDM Pusiknas yang kompeten	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pusiknas Bareskrim Polri	melakukan sertifikasi dan standar kompetensi terhadap SDM Pusiknas Bareskrim Polri	8 %
7	Meningkatnya pemenuhan Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Pusiknas Bareskrim Polri berbasis Teknologi dan Informasi	Peningkatan sarana dan prasarana Pusiknas Bareskrim Polri	memetakan prioritas pemenuhan sarana dan prasarana serta Modernisasi peralatan IT Pusiknas Bareskrim Polri	40 %
8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih, Terbuka dan Melayani	Reformasi kelembagaan dan birokrasi Pusiknas Barskrim Polri	meningkatkan manajemen kinerja Pusiknas Bareskrim Polri	BB
9	Terkelolanya anggaran Pusiknas Bareskrim Polri yang akuntabel	Penguatan akuntabilitas kinerja Pusiknas Bareskrim Polri	meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran Pusiknas Bareskrim Polri	95 %
10	Pengawasan pengendalian yang efektif	Penguatan regulasi dan pengawasan Pusiknas Bareskrim Polri	memperkuat kerangka regulasi Pusiknas Bareskrim Polri	100 %

Jakarta, 21 Juli 2022

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

HERU DWI PRATONDO, S.H., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

DATA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
SATKER PUSIKNAS BARESKRIM POLRI TA. 2022

NO	URAIAN BMN	SATUAN	JUMLAH	KONDISI BMN			KET
				BB	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kendaraan Dinas Jabatan/Pimpinan	Unit	1	1			
2	Kendaraan dinas roda empat (R-4)	Unit	14	13	1		
3	Kendaraan dinas roda dua (R-2)	Unit	21	21			
4	Tool Kit Box	Buah	5	5			
5	Crimping Tools	Buah	2	2			
6	Alat Bengkel tak bermesin lainnya	Buah	1	1			
7	Avo Meter SU 20-20 K	Buah	2	2			
8	Injection Pump Tester	Buah	5	5			
9	mesin fotocopy Double Folio	Buah	1	1			
10	mesin fotocopy Electronic	Buah	2	2			
11	Lemari Besi/Metal	Buah	23	23			
12	Brandkas	Buah	1	1			
13	Tabung Pemadam Api	Buah	1	1			
14	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	1			
15	Alat penghancur kertas	Buah	5	5			
16	Overhead Proyektor	Buah	1	1			
17	LCD Proyektor/Infocus	Buah	1	1			
18	Laser Pointer	Buah	3	3			
19	Acces Control System	Buah	3	3			
20	Monitor Panel With Mimic Board	Buah	4	4			
21	Focusing Screen/Layar LCD Proyector	Buah	2	2			
22	Proyector Spider Bracket	Buah	1	1			
23	Meja kerja Besi Metal	Buah	1	1			
24	Kursi Besi Metal	Buah	3	3			
25	Kursi Kayu	Buah	2	2			
26	Meja Resepsionist	Buah	1	1			
27	Gantungan Jas	Buah	2	2			
28	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	2	2			
29	Lemari Es	Buah	1	1			
30	Portabel Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	2	2			
31	Televisi	Buah	12	12			
32	Sound System	Buah	1	1			
33	Megaphone	Buah	5	5			
34	Tiang Bendera	Buah	1	1			

35. Dispenser.....

1	2	3	4	5	6	7	8
35	Dispenser	Buah	3	3			
36	Audio amplifier	Buah	1	1			
37	Uninteruptible Power Supply (UPS)	Buah	2	2			
38	Voice Recdorder	Buah	4	4			
39	Off Air TV Monitor	Buah	8	8			
40	Video Monitor	Buah	9	9			
41	Video Processor	Buah	1	1			
42	Slide Projector	Buah	3	3			
43	Layar Film/Projector	Buah	1	1			
44	Push Button Control Panel	Buah	1	1			
45	Camera Digital	Buah	2	2			
46	LCD Monitor	Buah	4	4			
47	Camera Conference	Buah	7	7			
48	Mesin Jilid	Buah	2	2			
49	Mesin Barcode	Buah	1	1			
50	Telephone (PABX)	Buah	2	2			
51	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	Buah	1	1			
52	Radio Link	Buah	1	1			
53	Network Monitoring System	Buah	3	3			
54	Switching Matrix and Server	Buah	8	8			
55	Wireless Base Station+Surveilance Manpack Kit	Buah	1	1			
56	Stabilizer/UPS	Buah	1	1			
57	Public Adress	Buah	1	1			
58	Borgol	Buah	10	10			
59	Computer Wedis	Buah	2	2			
60	P.C. Unit	Buah	66	66			
61	Laptop	Buah	48	48			
62	Tablet PC	Buah	9	9			
63	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	Buah	2	2			
64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	21	21			
65	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	2			
66	External/Portable Hardisk	Buah	11	11			
67	Server	Buah	41	41			
68	Router	Buah	17	17			
69	Hub	Buah	20	20			
70	Rak Server	Buah	2	2			
71	Firewall	Buah	1	1			
72	Switch Rack	Buah	4	4			
73	Kael UTP	Buah	1	1			
74	Switch	Buah	19	19			
75	KVM Keyboard Video Monitor	Buah	1	1			

76. Network...

1	2	3	4	5	6	7	8
76	Network Cable Tester	Buah	2	2			
77	Modul untuk penambahan di core switch	Buah	8	8			
78	Software Komputer		2	2			
79	Lisensi		47	47			

Jakarta, 21 Juli 2022

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

HERU DWI PRATONDO, S.H., M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

TNCC / PDAKT PUSIKNAS BARESKRIM POLRI

I. Latar Belakang Pembentukan Tncc

1. Pembentukan TNCC berawal dari MoU WG Polri-AFP di Perth Australia pada bulan Juni 2002;
2. TNCC adalah salah satu bentukan hasil kerjasama POLRI dengan AFP (SELAIN JCLEC, MNOST, RIBDC dll);
3. POLRI-AFP MOU WG & SC TNCC MEETING 2002;
4. Peresmian TNCC pada bulan Juli 2004 di Gedung NCB-Interpol lama dan Februari 2006 di lt. 12 gedung baru TNCC;
5. Blueprint Bareskrim Tahun 2008.

II. Dasar

1. Surat MENPAN Republik Indonesia Nomor: B/1174/M.PAN/6/2004 tanggal 30 Juni 2004 perihal Persetujuan pembentukan Organisasi Ditpam Obsus Babinkam Polri, Den 88/ AT Bareskrim Polri, TNCC dan JCLEC;
2. KEP KAPOLRI Nomor: KEP/22/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan atas KEP 30 tentang OTK Satuan-satuan Organisasi Tingkat Mabes Polri;
3. SKEP KAPOLRI Nomor: SKEP/22/X/2004 Tgl. 12 Oktober 2004 tentang Struktur Org/DSPP TNCC;
4. OTK Ro Analisis Bareskrim Polri Tahun 2006;
5. Bujuk Pengoperasionalan CMIS & SOP TNCC Bareskrim Polri Tahun 2006;
6. Blueprint Bareskrim Polri Tahun 2008;
7. Validasi Organisasi tingkat Mabes Polri TNCC dibawah Pusiknas Bareskrim Polri.

III. Tugas Pokok dan fungsi TNCC

1. Tugas :

   menyelenggarakan pengelolaan data kejahtaan transnasional dan menyalurkan kepada tim intesvigasi kriminal nasional maupun transnasional, serta memasukan data pada program CMIS (Case Mangement Intelligence Sytem).

III. Tugas...

IV. Tugas Pokok dan fungsi TNCC

2. Tugas :

menyelenggarakan pengelolaan data kejahtaan transnasional dan menyalurkan kepada tim intesvigasi kriminal nasional maupun transnasional, serta memasukan data pada program CMIS (Case Mangement Intelligence Sytem).

3. Fungsi:

a. pendataan dan pengelolaan data pada program CMIS (Case Managenent Intelligence Sytem) untuk mendukung penegakan hukum;

b. pengelolaan dan pemberian informasi hasil analisis dan evaluasi data kepada pihak terkait penegakan hukum;

c. pelaksanaan analisis kejahatan transnasional
(Ref: Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang OTK Bareskrim Polri)

V. Aplikasi dan Jaringan Infrastruktur

1. Aplikasi CMIS merupakan hibah/bantuan dari AFP dan telah dioperasionalkan sejak tahun 2004;

2. CMIS didisain untuk mampu menyimpan semua kasus transnasional dan laporan intelejen yang dikerjakan oleh satu tim investigasi kasus dari satuan kerja terkecil sampai satuan kerja terbesar;

3. arsitektur CMIS terdiri dari :

a. aplikasi server;

b. database server: CMIS memiliki database tersendiri tidak seperti database pada umumnya, CMIS menggunakan database berupa file / image;

c. aplikasi CMIS model Thin Client (melakukan komputasi sesuai dengan input dari sisi tahun client dan mengirimkan hasil output berupa gambar atau display yang akan ditampilkan dimonitor client);

4. CMIS sudah diinstal di PDAKT/TNCC (client dan server utama) dan terkoneksi dengan seluruh Polda menggunakan Jaringan Intranet VPN Div TIK Polri.

4. CMIS....

5. hardware dan software saat ini

   a. Hardware

      1) Server CMIS menggunakan Dell PowerEdge 2950;

      2) Firewall Fortigate peralatan keamanan jaringan yang mengatur laluilintas data yang akan masuk ke server CMIS.

   b. Software

      1) Masih menggunakan Windows Server 2003R dan Windows tersebut sudah tidak di support lagi oleh Microsoft yang berakhir pada tanggal 14 Juli 2015;

      2) Dengan berakhirnya support tersebut sebenarnya masih bisa menggunakan Windows Server 2003, namun Microsoft sudah tidak menjamin keamanannya karena Microsoft tidak lagi memberikan dukungan aplikasi, update, dan patch keamanan sehingga operasi Windows Server 2003 akan sangat rentan dengan masalah keamanan.

6. Output CMIS

   a. Analisis jaringan yaitu menggambarkan suatu kejadian tindak pidana kejahatan transnasional dalam bentuk jaring laba-laba / link chart;

   b. Statistik kejahatan transnasional.

VI. Penyelenggaraan Sistem CMIS

1. T.A. 2015

   a. Terjadinya perubahan hubungan politik antara Indonesia dengan Australia, atas perintah Kabareskrim Polri kepada Kabid PDAKT/TNCC Kombes Pol Drs. Wilmar Marpaung, SH untuk sementara sistem CMIS di non aktifkan/dimatikan sejak bulan Desember 2013 sampai ada petunjuk lebih lanjut, sehingga server CMIS mengalami kerusakan pada hardware, Operating sistem (OS) dan sistem CMIS;

   b. dengan kondisi tersebut di atas aplikasi CMIS telah dilakukan perwatan dan penggantian alat menggunakan DIPA Pusiknas Bareskrim Polri T.A. 2015.

c. perawatan....

c. perawatan sistem CMIS

1) perbaikan dengan melakukan konfigurasi ulang sistem keamanan jaringan server CMIS;

2) penggantian sparepart: Harddisk server, UPS dan memory server;

3) instalasi ulang aplikasi CMIS karena kerusakan pada harddisk server CMIS.

d. Impementasi pulahjianta

1) Nota Dinas Kapusiknas Bareskrim Polri kepada Kabareskrim Polri Nomor: B/ND-182/VIII/2015/Pusiknas tanggal 31 Agustus 2015 perihal permohonan pengaktifan aplikasi CMIS (Case Management Intelligent System);

2) Disposisi Kabareskrim Polri tanggal 3 September 2015 tentang pengaktifan sistem CMIS untuk dilakukan pengaktifan kembali.

2. T.A. 2016

a. Anggaran perawatan sistem CMIS

1) Konfigurasi jaringan VPN Intranet Polri / perubahan IP address dari 10.1.1.20 ke 10.101.112.2;

2) Perpanjangan lisensi firewall Fortinet;

3) Antivirus server dan Client;

4) Penggantian hardidisk server;

5) Upgrade memory server

b. Pengadaan Laptop CMIS untuk 32 Polda yang telah dibagikan pada saat Rakernis Pusiknas Bareskrim Polri T.A. 2016 tanggal 1 Juni 2016 kepada Ditreskrimum Polda;

c. Impementasi pulahjianta :

1) Polda / Satker yang telah menyediakan jaringan VPN Intranet Polri dan berhasil mengakes kedalam server CMIS : Polda yang telah berhasil terkoneksi dengan server CMIS ada 6 (lima) Polda terdiri dari: Polda Jatim, Polda Bali, Polda Banten, Polda Lampung, Polda Riau dan Polda NTB;

2) Sebagaimana...

d. tidak ada operator khusus untuk melakukan input data kedalam aplikasi CMIS dan operator yang sudah dilatih dimutasi dan tidak dilakukan meregenerasi;

e. para operator CMIS mengalami kesulitan untuk mengirimkan data kasus transnational karena data kasus masih dipegang oleh penyidik, karena ada karagu-raguan tentang kerahasiaan data.

2. Tingkat Kewilayahan

a. Laptop CMIS yang telah didistribusikan ke Polda-Polda yang ditempatkan di Ditreskrum Polda, sehingga Ditreskrimsus dan Narkoba harus bergantian dalam melakukan input data;

b. sering terjadinya gangguan koneksi IP CMIS sehingga Polda tidak dapat mengakses Sistem CMIS dan keterbatasan Bandwidth yang tersedia dari Div TI Polri sehingga dapat mengganggu kecepatan pengiriman data melalui sistem CMIS;

c. tidak ada operator khusus untuk melakukan input data kedalam aplikasi CMIS dan operator yang sudah dilatih dimutasi dan tidak dilakukan meregenerasi;

d. para operator CMIS mengalami kesulitan untuk mengirimkan data kasus transnational karena data kasus masih dipegang oleh penyidik, karena ada karagu-raguan tentang kerahasiaan data.

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB **(060)** KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
060.01.BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana			8,754,154,000	
3137	Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana			6,660,845,000	
3137.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan		6,660,845,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN				
3137.EBA.007	**Layanan Umum Dukungan Manajemen Lidik Sidik**	**1.0 Layanan**		**344,671,000**	
003	**Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan**			**344,671,000**	
AD	*RAPAT RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN/KELOMPOK KERJA/KONSULTASI*			*49,890,000*	
521211	Belanja Bahan			49,890,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Snack rapat dengan melibatkan satker Eselon II sebanyak 5 kegiatan x 37 orang x 12 bulan	2220.0 OG	22,000	48,840,000	
	- Penyusunan laporan - Foto copy 5 kegiatan x 10 lembar x 12 bulan	600.0 Lbr	250	150,000	
	- Penjilidan Laporan 15 buku x 12 bulan	180.0 lap	5,000	900,000	
DW	*PEMBINAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN*			*55,696,000*	
521211	Belanja Bahan			55,696,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Penataan Administrasi Personel Pusiknas Bareskrim Polri			24,420,000	
	- Foto copy 66 org x 4 giat x 3700 lembar	97680.0 LBR	250	24,420,000	
	> Penataan Administrasi SIMAK BMN Pusiknas Bareskrim Polri :			31,276,000	
	>> Laporan simak BMN		0	0	
	>> Laporan Bulanan (6 buku x 12 bulan)		0	11,340,000	
	- Biaya foto copy 6 buku x 12 bulan x 570 lembar	41040.0 LBR	250	10,260,000	
	- Biaya jilid 6 buku x 12 bulan x Rp. 15.000,-	72.0 BUKU	15,000	1,080,000	
	>> Laporan per Triwulan (6 buku x 4 Tw.)		0	3,960,000	
	- Biaya foto copy 6 buku x 4 Tw x 600 lembar	14400.0 LBR	250	3,600,000	
	- Biaya jilid 6 buku x 4 tw x Rp. 12.500,-	24.0 BUKU	15,000	360,000	
	>> Laporan per Semester 6 buku x 2 giat		0	3,855,000	
	- Biaya foto copy 6 buku x 2 Semester x 1.225 lembar	14700.0 LBR	250	3,675,000	
	- Biaya jilid 6 buku x 2 Semester x Rp. 12.500,-	12.0 BUKU	15,000	180,000	
	>> Rekonsiliasi Simak BMN		0	4,200,000	
	- Uang saku menghadiri rekon simak BMN 2 org x 2 hari x 7 giat	28.0 OH	150,000	4,200,000	
	>> Laporan Wasrik Simak BMN dan persediaan (4 buku x 2 giat)		0	1,096,000	
	- Biaya foto copy 8 buku x 2 giat x 206 lembar	3424.0 LBR	250	856,000	
	- Biaya jilid 8 buku x 2 giat x Rp. 12.500,-	16.0 BUKU	15,000	240,000	
	>> Sosialisasi Aplikasi SDM Polri dengan Narasumber Eselon II		0	6,825,000	
	- - Snack Rapat 30 orang x 10 giat x Rp. 22.000,-	300.0 og	22,000	6,600,000	
	- - Biaya foto copy 10 lembar x 3 laporan x 10 giat x Rp. 250,-	300.0 lbr	250	75,000	
	- - Biaya penjilidan Rp. 5.000,- x 30 laporan	30.0 lap	5,000	150,000	
E	*PENYUSUNAN PROGRAM, ANGGARAN DAN RENCANA KERJA*			*7,267,000*	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB	**(060)**	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG	(01)	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA	(678164)	PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI	Rp. 17,264,940,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			3,600,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Honorarium Operator Sistem E-Sirena Polri 1 org x 12 bulan x Rp. 300.000,-	12.0 ob	300,000	3,600,000	
521211	Belanja Bahan			3,667,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Menyusun Rancangan Rencana Kerja TA. 2022			2,046,000	
	- Biaya foto copy 180 lembar x 17 buku	3084.0 LBR	250	771,000	
	- Biaya penjilidan Rp. 75.000,- x 17 buku	17.0 BUKU	75,000	1,275,000	
	> Menyusun Rencana Kerja TA. 2022			1,621,000	
	- Biaya foto copy 80 lembar x 17 buku	1384.0 LBR	250	346,000	
	- Biaya penjilidan Rp. 75.000,- x 17 buku	17.0 BUKU	75,000	1,275,000	
F	*PENYUSUNAN RKA-KL DAN DIPA*			*142,764,000*	
521211	Belanja Bahan			8,364,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Menyusun Kebutuhan Anggaran T.A. 2024			2,091,000	
	- Biaya foto copy 192 lembar x 17 buku	3264.0 Lbr	250	816,000	
	- Biaya penjilidan Rp. 75.000,- x 17 buku	17.0 BUKU	75,000	1,275,000	
	> Menyusun Pagu Indikatif TA. 2024			2,091,000	
	- Biaya foto copy 192 lembar x 17 buku	3264.0 LBR	250	816,000	
	- Biaya penjilidan Rp. 75.000,- x 17 buku	17.0 BUKU	75,000	1,275,000	
	> Menyusun Pagu Anggaran TA. 2024			2,091,000	
	- Biaya foto copy = 192 lembar x 17 buku	3264.0 LBR	250	816,000	
	- Biaya penjilidan Rp. 75.000,- x 17 buku	17.0 BUKU	75,000	1,275,000	
	> Menyusun Alokasi Anggaran TA. 2024			2,091,000	
	- Biaya foto copy 192 lembar x 17 buku	3264.0 LBR	250	816,000	
	- Biaya penjilidan Rp. 75.000,- x 17 buku	17.0 BUKU	75,000	1,275,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			134,400,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Transpor Dalam Kota menghadiri Kegiatan Rapat/pertemuan di luar kantor giat fungsi Ren, Sumda, Binfung dan Urtu (3 org x 2 hari	480.0 OG	150,000	72,000,000	
	- Uang harian Giat Rapat/pertemuan di luar kantor giat fungsi Ren, Sumda, Binfung dan Urtu 3 org x 2 hari x 80 giat x Rp. 130.000,-	480.0 OG	130,000	62,400,000	
G	*PENYUSUNAN EVALUASI LKIP*			*27,629,000*	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan			27,629,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Penyusunan Evaluasi LKIP			27,629,000	
	>> Penyusunan LAKIP T.A. 2022		0	2,125,000	
	- Biaya foto copy = 200 lembar x 17 buku	3400.0 LBR	250	850,000	
	- Biaya penjilidan Rp. 75.000,- x 17 buku	17.0 BUKU	75,000	1,275,000	
	>> Menyusun Rengiat T.A. 2023		0	2,125,000	
	- Biaya foto copy = 32 lembar x 17 buku	3400.0 LBR	250	850,000	
	- Biaya penjilidan Rp. 75.000,- x 17 buku	17.0 Buku	75,000	1,275,000	
	>> Penyusunan Perjanjian Kinerja T.A. 2023		0	1,411,000	
	- Biaya foto copy = 32 lembar x 17 buku	544.0 LBR	250	136,000	
	- Biaya penjilidan Rp. 75.000,- x 17 buku	17.0 buku	75,000	1,275,000	
	>> Penyusunan anev Bulanan Capaian Kinerja Polri Tahun 2023		0	4,200,000	
	- Foto copy 50 lbr. x 4 buku x 12 bln x Rp. 250	2400.0 LBR	250	600,000	
	- Jilid 4 buku x 12 bulan x Rp. 75.000,-	48.0 BUKU	75,000	3,600,000	
	>> Penyusunan anev per Triwulan. Capaian Kinerja Polri Tahun 2023		0	1,400,000	
	- Foto copy 50 lembar x 4 buku x 4 Tw x Rp. 250	800.0 LBR	250	200,000	
	- Jilid 4 buku x 4 Tw x Rp. 5.000,-	16.0 BUKU	75,000	1,200,000	
	>> Jilid Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan Tahun 2023		0	5,868,000	
	- Foto copy 15 lembar x 75 buku x Rp. 250	972.0 lbr	250	243,000	
	- Jilid 75 Buku x Rp. 75.000,-	75.0 BUKU	75,000	5,625,000	
	>> Jilid Dokumen pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023		0	6,250,000	
	- Biaya fotocopy 200 lbr x 10 Bk x 5 Paket x Rp, 250,-	10000.0 LBR	250	2,500,000	
	- Jilid 10 buku x 5 Paket x Rp. 75.000,-	50.0 BUKU	75,000	3,750,000	
	>> Anev Kinerja Pusiknas Bareskrim Polri Semester I dan II T.A. 2023		0	4,250,000	
	- Biaya foto copy 200 lbr. x 17 buku x 2 giat x Rp, 250,-	6800.0 LBR	250	1,700,000	
	- Biaya jilid 17 buku x 2 giat x Rp. 75.000,-	34.0 BUKU	75,000	2,550,000	
I	*PENYUSUNAN NASKAH BUKU LAINNYA*			*61,425,000*	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan			61,425,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Penyusunan lanjutan Revisi dan Pengkajian Perkap nomor 15 tahun 2010 menjadi Perpol			21,150,000	
	- Snack Rapat 30 org x 15 giat x Rp. 22.000,-	450.0 OG	22,000	9,900,000	
	- Biaya foto copy 80 lbr x 30 org x 15 giat	36000.0 LBR	250	9,000,000	
	- Penjilidan naskah 30 Buku x Rp. 75.000,-	30.0 BUKU	75,000	2,250,000	
	> Penyusunan Revisi dan Pengkajian SOTK Pusiknas Barekrim Polri			20,025,000	
	- Snack Rapat 30 org x 15 giat x Rp. 22.000,-	450.0 OG	22,000	9,900,000	
	- Biaya foto copy 70 lbr x 30 org x 15 giat	31500.0 LBR	250	7,875,000	
	- Penjilidan naskah 30 Buku x Rp. 75.000,-	30.0 BUKU	75,000	2,250,000	
	> Penyusunan pertelaahan staf Pusiknas Barekrim Polri			20,250,000	
	- Snack Rapat 15 giat x 30 org x Rp. 22.000,-	450.0 og	22,000	9,900,000	
	- biaya foto copy 72 lbr x 30 org x 15 giat	32400.0 lbr	250	8,100,000	
	- Penjilidan naskah 25 buku x Rp. 45.000,-	30.0 buku	75,000	2,250,000	
3137.EBA.994	**Layanan Perkantoran**	**1.0 Layanan**		**6,316,174,000**	
001	**Gaji dan Tunjangan**			**6,173,502,000**	
A	*Pembayaran Gaji dan Tunjangan*			*6,173,502,000*	
511161	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri			1,708,154,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	1.0 THN	1,464,132,000	1,464,132,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	122,011,000	122,011,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	122,011,000	122,011,000	
511169	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri			24,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	1.0 THN	20,000	20,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,000	2,000	
511171	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri			1.2,290,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	1.0 THN	104,820,000	104,820,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	8,735,000	8,735,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	8,735,000	8,735,000	
511172	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri			35,686,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	1.0 THN	30,588,000	30,588,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,549,000	2,549,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,549,000	2,549,000	
511173	Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri			315,420,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	1.0 THN	270,360,000	270,360,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	22,530,000	22,530,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	22,530,000	22,530,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB	**(060)**	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG	(01)	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA	(678164)	PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI	Rp. 17,264,940,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511175	Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri			4,242,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	1.0 THN	3,636,000	3,636,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	303,000	303,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	303,000	303,000	
511176	Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri			79,092,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	1.0 THN	79,092,000	79,092,000	
511179	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri			343,000,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	1.0 THN	343,000,000	343,000,000	
511193	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri			17,920,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	1.0 THN	15,360,000	15,360,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,280,000	1,280,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,280,000	1,280,000	
511211	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI			1,916,152,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	1.0 THN	1,642,416,000	1,642,416,000	
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	136,868,000	136,868,000	
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	136,868,000	136,868,000	
511219	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI			24,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	1.0 THN	20,000	20,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,000	2,000	
511221	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI			147,952,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	1.0 THN	126,816,000	126,816,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	10,568,000	10,568,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	10,568,000	10,568,000	
511222	Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI			17,948,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	1.0 THN	11,816,000	11,816,000	
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,066,000	3,066,000	
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,066,000	3,066,000	
511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI			551,250,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	1.0 THN	472,500,000	472,500,000	
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	39,375,000	39,375,000	
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	39,375,000	39,375,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB **(060)** KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI			53,018,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	1.0 THN	45,444,000	45,444,000	
	- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,787,000	3,787,000	
	- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,787,000	3,787,000	
511226	Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI			98,724,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	1.0 THN	98,724,000	98,724,000	
511228	Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI			714,240,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	1.0 THN	714,240,000	714,240,000	
511232	Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI			3,500,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	250,000	250,000	
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	250,000	250,000	
511244	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri			7,350,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	1.0 THN	6,300,000	6,300,000	
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	525,000	525,000	
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	525,000	525,000	
512211	Belanja Uang Lembur			37,516,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Uang Lembur Gol II (4 ORG X 3 JAM X 108 HR)	1296.0 OJ	9,000	11,664,000	
	- Uang Lembur Gol III (3 ORG X 3 JAM X 108 HR)	972.0 OJ	11,000	10,692,000	
	- Uang Makan (7 ORG X 108 HR)	758.0 OJ	20,000	15,160,000	
002	**Operasional dan Pemeliharaan Kantor**			**142,672,000**	
BW	*PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR*			*142,672,000*	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			142,672,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Biaya keperluan sehari hari perkantoran di dalam negeri			90,000,000	
	- Biaya keperluan sehari hari perkantoran di dalam negeri	60.0 OT	1,500,000	90,000,000	
	> Belanja bahan baku komputer			52,672,000	
	- HP. tri-color print cartridge D 1660	2.0 BUAH	400,000	800,000	
	- Canon black print cartridge IP-1 1700	4.0 BUAH	350,000	1,400,000	
	- Canon tri-color prin cartridge IP-1700	2.0 BUAH	400,000	800,000	
	- Canon black print cartridge 1200	4.0 BUAH	300,000	1,200,000	
	- Canon tri-color print cartridge 1200	2.0 BUAH	400,000	800,000	
	- HP. Black print cartridge F 2410	3.0 BUAH	400,000	1,200,000	
	- HP. Tri-color print cartridge F 2410	2.0 BUAH	400,000	800,000	
	- Canon black print cartridge 1300	4.0 BUAH	300,000	1,200,000	
	- Canon tri-color print cartridge 1300	2.0 BUAH	400,000	800,000	
	- Canon black print cartridge IP-1980	5.0 BUAH	300,000	1,500,000	
	- Canon tri-color print cartridge IP-1980	2.0 BUAH	400,000	800,000	
	- Toner HP Laserjet P 1320 black	3.0 BUAH	900,000	2,700,000	
	- Toner HP Laserjet 15 A black	4.0 BUAH	900,000	3,600,000	
	- Toner HP Laserjet 12 A black	3.0 BUAH	900,000	2,700,000	
	- Toner HP Laserjet P 1020 black	4.0 BUAH	900,000	3,600,000	
	- Toner HP Laserjet P 1021 color	2.0 BUAH	900,000	1,800,000	
	- Toner HP Laserjet P 1102 black	3.0 BUAH	900,000	2,700,000	
	- Toner Laserjet HP CP 13518 ni black	3.0 BUAH	1,500,000	4,500,000	
	- Toner Laserjet HP CP 13518 ni color	1.0 BUAH	1,800,000	1,800,000	
	- Toner Laserjet IBM infoprint black	2.0 BUAH	1,500,000	3,000,000	
	- Toner Laserjet CP 3525 black	2.0 BUAH	1,500,000	3,000,000	
	- Toner Laserjet Type A ML 2851 ND Black	1.0 BUAH	1,722,000	1,722,000	
	- Toner Laserjet Type A ML 2851 ND color (3 warna x 1 bh/tahun)	3.0 BUAH	1,750,000	5,250,000	
	- Toner Cannon LBP 6000 Black	5.0 BUAH	1,000,000	5,000,000	
5084	Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional			2,093,309,000	
5084.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	1858.0 layanan		2,093,309,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN				
5084.BMA.001	**Penyajian Informasi Kriminal Nasional**	**1858.0 layanan**		**2,093,309,000**	
003	**Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan**			**2,093,309,000**	
AD	*RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI*			*682,412,000*	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB **(060)** KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			26,400,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Honor Panitia			10,400,000	
	- Pengarah 1 org. x 4 giat x Rp. 500.000,-	4.0 og	500,000	2,000,000	
	- Penanggungjawab 1 org.x 4 Giat x Rp. 450.000,-	4.0 og	450,000	1,800,000	
	- Ketua 1 org. x 4 giat x Rp. 400.000,-	4.0 og	400,000	1,600,000	
	- Wakil Ketua 1 org. x 4 Giat x Rp. 350.000,-	4.0 og	350,000	1,400,000	
	- Sekertaris 1 org. x 4 Giat x Rp. 300.000,-	4.0 og	300,000	1,200,000	
	- Anggota 2 org. x 4 Giat x Rp. 300.000,-	8.0 og	300,000	2,400,000	
	> Honor Narasumber			16,000,000	
	- Honor Narasumber 4 orang x 4 triwulan x 1 hr x Rp. 1.000.000,-	16.0 og	1,000,000	16,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB **(060)** KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan			656,012,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Anev triwulan dalam rangka verifikasi dan validasi data Kriminal Nasional Pusiknas Bareskrim Polri sebagai Wali Data dengan Satker Di Lingkungan Mabes Polri Terkait Analisa Dan Evaluasi Tentang Format Data Dari Produsen Data.			656,012,000	
	>> Pelaksanaan Kegiatan :		0	0	
	>> Paket Rapat per Triwulan		0	409,792,000	
	- Paket Fullday untuk peserta 71 orang x 4 giat x 2 hari x Rp. 550.000,-	568.0 Giat	550,000	312,400,000	
	- Paket Fullday untuk narasumber dan pendamping 6 orang x 4 giat x 2 hari x Rp. 433.000,-	48.0 og	433,000	20,784,000	
	- Paket Fullboard untuk panitia 8 orang x 4 giat x 2 hari x Rp. 1.197.000,-	64.0 og	1,197,000	76,608,000	
	>> Transpor Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)		0	93,600,000	
	- peserta 71 orang x 2 hr x 4 giat x 150.000,-	568.0 og	150,000	85,200,000	
	- panitia 8 orang x 1 hr x 4 giat x 150.000,-	32.0 oh	150,000	4,800,000	
	- Narasumber/pendamping = 6 orang x 1 hari x 4 giat x 150.000,-	24.0 og	150,000	3,600,000	
	>> Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor		0	85,280,000	
	- peserta 71 org, x 2 hr x 4 giat x 130.000,-	568.0 og	130,000	73,840,000	
	- panitia 8 orang x 2 hari x 4 giat x 130.000,-	64.0 oh	130,000	8,320,000	
	- Narasumber/pendamping = 6 orang x 1 hari x 4 giat x 130.000,-	24.0 og	130,000	3,120,000	
	>> ATK Rapat untuk 4 Triwulan :		0	49,540,000	
	- Kertas F4 2 x 4 giat x Rp. 55.000,-	8.0 rim	55,000	440,000	
	- Tinta Printer colour 4 buah x Rp. 350.000,-	4.0 buah	350,000	1,400,000	
	- Tinta Printer black 1 buah x 4 giat x Rp. 300.000,-	4.0 buah	300,000	1,200,000	
	- Bolpoint 7 lusin x 4 giat x Rp. 20.000,-	28.0 lusin	20,000	560,000	
	- Stop Map 6 lusin x 4 giat x Rp. 25.000,-	24.0 lusin	25,000	600,000	
	- Spanduk 2 buah x 4 giat x Rp. 450.625,-	8.0 buah	450,625	3,605,000	
	- Foto copy naskah 85 buku x 25 lbr x 4 giat x Rp. 250,-	8500.0 lbr	250	2,125,000	
	- Cetak map Pusiknas 85 buah x 4 giat x Rp. 25.000,-	340.0 buah	25,000	8,500,000	
	- Tas 85 buah x 4 giat x Rp. 92.500	340.0 buah	91,500	31,110,000	
	>> Dekorasi		0	13,200,000	
	- Backdrop panggung Rp. 100.000,-/m2 x 3 m x 6 m x 4 giat	72.0 meter	100,000	7,200,000	
	- Taman indoor dan bunga meja narasumber Rp. 1.500.000,- x 4 giat	4.0 giat	1,500,000	6,000,000	
	>> plakat untuk 2 narasumber		0	2,800,000	
	- plakat untuk 2 narasumber dari BPS dan Menkopolhukam 2 buah x 4 giat x Rp. 350.000,-	8.0 buah	350,000	2,800,000	
	>> Pembuatan laporan		0	1,800,000	
	- Foto copi 60 lbr x 5 buku x 4 giat x Rp. 250,-	1200.0 lbr	250	300,000	
	- Penjilidan 5 buku x 4 giat x Rp. 75.000,-	20.0 buku	75,000	1,500,000	
AM	*PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN*			*449,380,000*	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			105,600,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Pramubakti (2 orang x 12 bulan)	24.0 ob	4,400,000	105,600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			231,780,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Pejabat kuasa pengguna anggaran 1 org x 12 bulan x Rp. 3.000.000,-	12.0 OB	3,000,000	36,000,000	
	- Pejabat pembuat komitmen 1 org x 12 bulan x Rp. 2.200.000,-	12.0 OB	2,200,000	26,400,000	
	- Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan SPM 1 org x 12 bulan x Rp. 990.000,-	12.0 OB	990,000	11,880,000	
	- Bendahara pengeluaran/pemegang uang muka 1 org x 12 bulan x Rp. 1.000.000,-	12.0 OB	1,000,000	12,000,000	
	- Staf pengelola/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) 5 org x 12 bu	60.0 OB	550,000	33,000,000	
	- Pejabat pangadaan barang dan jasa Roda 4, Peralatan Kantor dan Keperluan seharihari perkantoran 3 org x 1 Paket x Rp. 650.000	3.0 OP	650,000	1,950,000	
	- Panitia pangadaan barang jasa non kontruksi Pemeliharaan Sitem Piknas 3 org x 1 paket x Rp. 1.750.000,-	3.0 OP	1,750,000	5,250,000	
	- Panitia pengadaan barang dan jasa non kontruksi Pemeliharaan Sistem CMIS 3 orang x 1 paket x Rp. 1.100.000,-	3.0 op	1,100,000	3,300,000	
	- Honorarium Operator Sistem SMAP Polri Off Line dan on Line, Monev DJA Kemenkeu RI, E-Monev Bappenas dan E-Sirena 3 org x 12 bulan	24.0 OB	300,000	7,200,000	
	- Honorarium tenaga Ahli Sistem Piknas 1 orang x 12 bulan x Rp. 7.000.000,-	12.0 ob	7,000,000	84,000,000	
	- Penanggung jawab Simak BMN 1 orang x 12 bulan x Rp. 300.000,-	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Anggota/Petugas Simak BMN 1 orang x 12 bulan x Rp. 150.000,-	12.0 OB	150,000	1,800,000	
	- Ketua Simak BMN 1 orang x 12 bulan x Rp. 200.000,-	12.0 OB	200,000	2,400,000	
	- Koordinator Simak BMN 1 orang x 12 bulan x Rp. 250.000,-	12.0 OB	250,000	3,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			112,000,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Uang transpor untuk mendukung kegiatan rapat di luar kantor fungsi Bid Kerma, Yaninfokrim, Bangsis, PDAKT, Urkeu, Urtu dilingkunga	400.0 OG	150,000	60,000,000	
	- Uang harian Giat Rapat/pertemuan di luar kantor giat fungsi Bid Kerma, Yaninfokrim, Bangsis, PDAKT, Urkeu, Urtu dilingkungan Pusik	400.0 OG	130,000	52,000,000	
DP	*PELATIHAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA*			*44,120,000*	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			44,120,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Pelatihan Teknologi Informasi Sertipikat			44,120,000	
	>> Peserta Pelatihan TI dari personel Pusiknas Bareskrim Polri		0	42,745,000	
	- Uang Harian Peserta training statistik dari personel Pusiknas Bareskrim Polri 10 org x 10 hari x Rp.160.000,-	100.0 oh	160,000	16,000,000	
	- Transport dalam kota Peserta training statistik dari personel Pusiknas Bareskrim Polri 10 org x 10 hari x Rp. 150.000,-	100.0 oh	150,000	15,000,000	
	- Paket Traning (Instruktur, Tempat, Modul dan Sertipikat TI)	10.0 og	1,174,500	11,745,000	
	>> Penyusunan Laporan dandokumentasi kegiatan		0	1,375,000	
	- Foto kegiatan pelatihan 100 lembar x Rp. 10.000,-	100.0 lbr	10,000	1,000,000	
	- - Foto copy 100 lembar x 5 buku x Rp. 250,-	500.0 lbr	250	125,000	
	- Penjilidan Buku Laporan 5 laporan x Rp. 50.000,-	5.0 lqp	50,000	250,000	
ER	*KERJASAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA/LEMBGA TERKAIT*			*195,840,000*	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB **(060)** KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan			195,840,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Forum Group Discusion (FGD) Penyusunan Road Map Pusiknas Bareskrim Polri			79,662,000	
	- Forum Group Discusion (FGD) satu data indonesia dengan Kementerian/Lembaga dengan peserta sebanyak 71 orang	1.0 giat	79,662,000	79,662,000	
	> Monitoring kerja sama integrasi data dengan kementerian/lembaga penegak Hukum			10,670,000	
	- Monitoring kerja sama integrasi data dengan kementerian/lembaga sebnyak 5 (lima) K/L	1.0 Giat	10,670,000	10,670,000	
	> Evaluasi kerja sama integrasi data dengan Kementerian/Lembaga			42,683,000	
	- Evaluasi kerja sama integrasi data dengan Kementerian/ Lembaga sebanyak 10 K/L	1.0 giat	42,683,000	42,683,000	
	> Penandatanganan dokumen PKS atau pembahasan draft PKS dengan 5 K/L			18,385,000	
	- Penandatanganan dokumen PKS atau pembahasan draft PKS sebanyak 5 K/l	5.0 Giat	3,677,000	18,385,000	
	> Kunjungan koordinasi/penjajakan/perintisan dan kerja sama dengan Instansi Kementerian/ Lembaga			43,950,000	
	- Kunjungan koordinasi/penjajakan/perintisan dan kerja sama dengan Instansi Kementerian/ Lembaga sebanyak 10 K/L	1.0 Giat	43,950,000	43,950,000	
	> Penyusunan laporan analisa dan evaluasi kegiatan Bid Kerma			490,000	
	- Penyusunan laporan analisa dan evaluasi kegiatan Bid Kerma	1.0 giat	490,000	490,000	
FS	*DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER*			*721,557,000*	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja			3,030,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	>> Honorarium penyusunan jurnal Kriminal Nasional Tahun 2021		0	3,030,000	
	- Penanggung Jawab 1 orang x 1 Oter x Rp. 500.000,-	1.0 OTER	500,000	500,000	
	- Redaktur 1 orang x 1 oter X Rp. 400.000,-	1.0 OTER	400,000	400,000	
	- Penyunting/Editor 3 org.1 Oter x Rp.300.000,-	3.0 OTER	300,000	900,000	
	- Desain Grafis 3 orang x 1 Oter x Rp. 180.000,-	3.0 oter	180,000	540,000	
	- Fotografer 3 orang x 1 Oter x Rp. 180.000,-	3.0 oter	180,000	540,000	
	- Sekretaris 1 orang x 1 Oter x Rp. 150.000,-	1.0 OTER	150,000	150,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB **(060)** KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
521211	Belanja Bahan			718,527,000		RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	> PUSIKNAS BARESKRIM POLRI			359,109,000	9	
	>> Duk ops Satker Pusiknas Bareskrim Polri		0	44,289,000		
	- Pembelian alat tulis Uni-ball Signo Broad UM-153 Gel Ink Pens - 1.0 mm	5.0 LUSIN	450,000	2,250,000		
	- Pebayaran Indovision ruangan Kapusiknas (450.000 x 12 bulan)	12.0 BLN	450,000	5,400,000		
	- Buku laporan verbal 5 buku x Rp. 200.000,-	5.0 BUKU	200,000	1,000,000		
	- Pengharum ruangan 2 botol x 12 bulan x Rp. 50.000,-	24.0 BOTOL	65,000	1,560,000		
	- Tinta printer cannon 328 4 set x Rp. 2.150.000,-	4.0 SET	2,150,000	8,600,000		
	- Tinta Printer HP Laser Jet 1200 series 6 buah x Rp. 2.150.000,-	6.0 BUAH	2,150,000	12,900,000		
	- Tinta Printer HP Color Laser Jet CP 3525 (4 warna) 4 buah x Rp. 3.019.750,-	4.0 BUAH	3,019,750	12,079,000		
	- Bindex 10 buah x Rp. 50.000,-	10.0 BUA	50,000	500,000		
	>> Rapat Kordinasi		0	314,820,000		
	- Snack 165 giat x 12 bulan	1980.0 OB	49,000	97,020,000		
	- Makan 165 giat x 12 bulan	1980.0 OB	110,000	217,800,000		
	> PELAYANAN INFORMASI KRIMINAL NASIONAL			205,176,000	6	
	>> Penyusunan data jurnal Kriminal Nasional Tahun 2021		0	103,900,000		
	- Biaya cetak laporan 214 buku x Rp. 450.000,-	214.0 BUKU	450,000	96,300,000		
	- Biaya pengiriman Laporan 34 Polda (1 Polda dan 3 Direktorat)	1.0 GIAT	7,600,000	7,600,000		
	>> Rapat penyusunan jurnal dengan Baharkam Polri, Korlantas Baharkam Polri dan Robinops Bareskrim Polri.		0	6,348,000		
	- Biaya Makan 2 giat x 46 orang x Rp. 47.000,-	92.0 og	47,000	4,324,000		
	- Biaya Snack 2 giat x 46 orang x Rp. 22.000,-	92.0 OG	22,000	2,024,000		
	>> Rapat koordinasi dengan produsen data kriminalitas di jajaran Mabes Polri		0	14,352,000		
	- Snack Rapat 52 orang x 4 giat	208.0 og	22,000	4,576,000		
	- Makan 52 orang x 4 giat	208.0 og	47,000	9,776,000		
	>> Laporan Bulanan		0	0		
	>> Penyusunan laporan Anev data lalulintas Per Bulan Tahun 2022		0	10,464,000		
	- Foto copy 16 lap x 12 bulan x 78 lembar	14976.0 LBR	250	3,744,000		
	- Jilid laporan 192 Laporan x Rp. 35.000,-	192.0 LAP	35,000	6,720,000		
	>> Penyusunan laporan Anev data kriminal Per Bulan tahun 2022		0	10,320,000		
	- Foto copy 16 lap x 12 bulan x 75 lembar	14400.0 LBR	250	3,600,000		
	- Jilid laporan 192 Laporan x Rp. 35.000,-	192.0 LAP	35,000	6,720,000		
	>> Penyusunan laporan Anev data kejahatan/penggunaan narkoba per Bulan tahun 2022		0	10,080,000		
	- Foto copy 16 lap x 12 bulan x 70 lembar	13440.0 LBR	250	3,360,000		
	- Jilid laporan 192 Laporan x Rp. 35.000,-	192.0 LAP	35,000	6,720,000		
	>> Penyusunan laporan input data SPPTI ber basis IT Per Bulan tahun 2022		0	9,840,000		
	- Foto copy 16 lap x 12 bulan x 65 lembar	12480.0 LBR	250	3,120,000		
	- Jilid laporan 192 Laporan x Rp. 35.000,-	192.0 LAP.	35,000	6,720,000		
	>> Penyusunan laporan Polisi yang di input oleh PPNS Per Bulan tahun 2022		0	9,840,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Foto copy 16 lap x 12 bulan x 65 lembar	12480.0 LBR	250	3,120,000	
	- Jilid laporan 192 Laporan x Rp. 35.000,-	192.0 LAP.	35,000	6,720,000	
	>> Laporan Triwulanan		0	0	
	>> Penyusunan lap. Anev data lalulintas Per Triwulan tahun 2022		0	3,424,000	
	- Foto copy 4 TW x 16 laporan x 74 lembar	4736.0 LBR	250	1,184,000	
	- Jilid laporan 64 Laporan x Rp. 35.000,-	64.0 LAP	35,000	2,240,000	
	>> Penyusunan laporan Anev data kriminal Per Triwulan tahun 2022		0	3,488,000	
	- Foto copy 4 TW x 16 laporan x 78 lembar	4992.0 LBR	250	1,248,000	
	- Jilid laporan 64 Laporan x Rp. 35.000,-	64.0 LAP	35,000	2,240,000	
	>> Penyusunan laporan Anev data kejahatan/penggunaan narkoba Per Triwulan tahun 2022		0	3,456,000	
	- Foto copy 4 TW x 16 laporan x 76 lembar	4864.0 LBR	250	1,216,000	
	- Jilid laporan 64 Laporan x Rp. 35.000,-	64.0 LAP	35,000	2,240,000	
	>> Penyusunan laporan input data SPPTI ber basis IT Per Triwulan tahun 2022		0	3,360,000	
	- Foto copy 4 TW x 16 laporan x 70 lembar	4480.0 LBR	250	1,120,000	
	- Jilid laporan 64 Laporan x Rp. 35.000,-	64.0 LAP.	35,000	2,240,000	
	>> Penyusunan laporan Polisi yang di input oleh PPNS Per Triwulan tahun 2022		0	3,360,000	
	- Foto copy 4 TW x 16 laporan x 70 lembar	4480.0 LBR	250	1,120,000	
	- Jilid laporan 64 Laporan x Rp. 35.000,-	64.0 LAP.	35,000	2,240,000	
	>> Laporan Semester		0	0	
	>> Penyusunan lap. Anev data lalulintas Per Semester tahun 2022		0	1,720,000	
	- Foto copy 2 semester x 16 laporan x 75 lembar	2400.0 LBR	250	600,000	
	- Jilid laporan 32 Laporan x Rp. 35.000,-	32.0 LAP	35,000	1,120,000	
	>> Penyusunan laporan Anev data kriminal Per Semester tahun 2022		0	1,744,000	
	- Foto copy 2 semester x 16 laporan x 78 lembar	2496.0 LBR	250	624,000	
	- Jilid laporan 32 Laporan x Rp. 35.000,-	32.0 LAP	35,000	1,120,000	
	>> Penyusunan laporan Anev data kejahatan/penggunaan narkoba Per Semester tahun 2022		0	1,680,000	
	- Foto copy 2 semester x 16 laporan x 70 lembar	2240.0 LBR	250	560,000	
	- Jilid laporan 32 Laporan x Rp. 35.000,-	32.0 LAP	35,000	1,120,000	
	>> Penyusunan laporan input data SPPTI ber basis IT Per Semester tahun 2022		0	1,680,000	
	- Foto copy 2 semester x 16 laporan x 70 lembar	2240.0 LBR	250	560,000	
	- Jilid laporan 32 Laporan x Rp. 35.000,-	32.0 LAP	35,000	1,120,000	
	>> Penyusunan laporan Polisi yang di input oleh PPNS Per Semester tahun 2022		0	1,680,000	
	- Foto copy 2 semester x 16 laporan x 70 lembar	2240.0 LBR	250	560,000	
	- Jilid laporan 32 Laporan x Rp. 35.000,-	32.0 LAP.	35,000	1,120,000	
	>> Laporan Tahunan		0	0	
	>> Penyusunan laporan Anev data lalulintas per tahun 2022		0	900,000	
	- Foto copy 1 giat x 16 laporan x 85 lembar	1360.0 LBR	250	340,000	
	- Jilid laporan 16 Laporan x Rp. 35.000,-	16.0 LAP	35,000	560,000	
	>> Penyusunan laporan Anev data kriminal Per tahun 2022		0	920,000	
	- Foto copy 1 giat x 16 laporan x 90 lembar	1440.0 LBR	250	360,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Jilid laporan 16 Laporan x Rp. 35.000,-	16.0 LAP	35,000	560,000	
	>> Penyusunan laporan Anev data kejahatan/penggunaan narkoba Per tahun 2022		0	900,000	
	- Foto copy 1 giat x 16 laporan x 85 lembar	1360.0 LBR	250	340,000	
	- Jilid laporan 16 Laporan x Rp. 35.000,-	16.0 LAP	35,000	560,000	
	>> Penyusunan laporan input SPPT ber basis IT per bulan tahun 2022		0	860,000	
	- Foto copy 1 giat x 16 laporan x 75 lembar	1200.0 LAP	250	300,000	
	- Jilid laporan 16 Laporan x Rp. 35.000,-	16.0 LAP	35,000	560,000	
	>> Penyusunan lap. LP yang di input oleh PPNS per bulan tahun 2022		0	860,000	
	- Foto copy 1 giat x 16 laporan x 75 lembar	1200.0 LBR	250	300,000	
	- Jilid laporan 16 Laporan x Rp. 35.000,-	16.0 LAP	35,000	560,000	
	> PENGEMBANGAN SISTEM			96,150,000	
	>> Penyusunan laporan Bulanan Monitoring Aplikasi Sistem PIKNAS dan Aplikasi SPPT-TI		0	11,520,000	
	- Fotocopy Laporan 120 lbr.x 12 bulan x 12 buku x Rp. 250	17280.0 LBR	250	4,320,000	
	- Penjilidan laporan 12 buku x 12 bulan x Rp. 50.000	144.0 LAP	50,000	7,200,000	
	>> Penyusunan laporan Bulanan Monitoring Perangkat Sistem PIKNAS dan Aplikasi SPPT-TI		0	11,880,000	
	- Fotocopy Laporan 130 lbr.x 12 bulan x 12 buku x Rp. 250	18720.0 LBR	250	4,680,000	
	- Penjilidan laporan 12 buku x 12 bulan x Rp. 50.000,-	144.0 LAP	50,000	7,200,000	
	>> Pembuatan Laporan tahunan monitoring Aplikasi Sistem PIKNAS dan Aplikasi SPPT-TI		0	1,200,000	
	- Fotocopy Laporan 200 lbr.x 1 giat x 12 buku x Rp. 250	2400.0 LBR	250	600,000	
	- Penjilidan laporan 12 buku x 1 giat x Rp. 50.000,-	12.0 LAP	50,000	600,000	
	>> Pembuatan Laporan tahunan monitoring Perangkat Sistem PIKNAS dan Aplikasi SPPT-TI		0	1,200,000	
	- Fotocopy Laporan 200 lbr.x 1 giat x 12 buku x Rp. 250	2400.0 LBR	250	600,000	
	- Penjilidan laporan 12 buku x 1 Giat x Rp. 50.000,-	12.0 LAP	50,000	600,000	
	>> Rapat staf fungsi Bid Bangsis		0	13,500,000	
	- Fotocopy laporan 60 giat x 30 lembar x 12 lap. x Rp. 250,-	18000.0 lbr	250	4,500,000	
	- Penjilidan laporan 60 giat x 12 lap. x Rp. 15.000,-	600.0 buku	15,000	9,000,000	
	>> Rapat Koordinasi terkait aplikasi sistem Piknas, Aplikasi SPPT-TI dan jaringan dengan Div Tik Polri, Itwasum Polri, Robinops Bareskrim Polri, Rokorwas PPNS Bareskrim Polri		0	17,950,000	
	- Snack rapat 30 Orang X 20 giat x Rp. 22.000,-	600.0 og	22,000	13,200,000	
	- Foto copy laporan 20 giat x 20 lembar x 10 lap. x Rp. 250,-	7000.0 lbr	250	1,750,000	
	- Jilid Laporan 20 giat x 10 lap. x Rp. 15.000,-	200.0 buku	15,000	3,000,000	
	>> Monitoring /evaluasi Perangkat Sistem PIKNAS, dan Aplikasi SPPT-TI Per Triwulan dengan Div Tik Polri, Itwasum Polri, Robinops Bareskrim Polri, Rokorwas PPNS Bareskrim Polri		0	38,900,000	
	- Snack rapat 4 Tw x 5 hari x 25 orang x Rp. 22.000,-	500.0 oh	22,000	11,000,000	
	- Makan 4 Tw x 5 hari x 25 orang x Rp. 47.000,-	500.0 oh	47,000	23,500,000	
	- Foto copy laporan 180 lbr x 10 buku x 4 Tw. x Rp. 250,-	7200.0 lbr	250	1,800,000	
	- Jilid Laporan 10 buku x 4 Tw. x Rp. 65.000,-	40.0 buku	65,000	2,600,000	
	> PUSAT DATA ANALISA KEJAHATAN TRANSNASIONAL			58,092,000	
	>> Penyusunan Laporan Bulanan 14 jenis kejahatan Transnasional (terorisme, narkotika, penyelundupan		0	24,360,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB **(060)** KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	>> manusia, perdaganga		0	24,360,000		
	- foto copy : 80 lbr x 8 Tim x 10 buku x 12 bln x 250	61440.0 LBR	250	15,360,000		
	- Jilid 10 buku x 12 bln x Rp. 75.000,-	120.0 LAP	75,000	9,000,000		
	>> Penyusunan Laporan Anev Triwulanan 14 jenis kejahatan Transnasional (terorisme, narkotika, penyelundupan manusia, pe		0	9,800,000		
	- Foto copy : 85 lbr x 8 Tim x 10 buku x 4 TW x 250	27200.0 LBR	250	6,800,000		
	- Jilid 10 buku x 4 TW x Rp. 75.000,-	40.0 lap	75,000	3,000,000		
	>> Penyusunan Laporan Anev Semester 14 jenis kejahatan Transnasional (terorisme, narkotika, penyelundupan manusia, perd		0	7,500,000		
	- Foto copy : 150 lbr x 8 Tim x 10 buku x 2 giat x 250	24000.0 LBR	250	6,000,000		
	- Jilid 10 buku x 2 giat x Rp. 75.000,-	20.0 LAP	75,000	1,500,000		
	>> Penyusunan Laporan Anev Tahunan 14 jenis kejahatan Transnasional (terorisme, narkotika, penyelundupan manusia, perda		0	4,750,000		
	- Foto copy : 200 lbr x 8 Tim x 10 buku x 1 giat x 250	16000.0 LBR	250	4,000,000		
	- Jilid 10 buku x 1 giat x Rp. 75.000,-	10.0 LAP	75,000	750,000		
	>> Rapat Sinkronisasi dan Validasi Data 14 jenis kejahatan Transnasional (terorisme, narkotika, penyelundupan manusia,		0	6,072,000		
	- Snack rapat 22 org x 4 giat x Rp. 22.000,-	88.0 OG	22,000	1,936,000		
	- Makan rapat 22 org x 4 giat x Rp. 47.000,-	88.0 OG	47,000	4,136,000		
	>> Penyusunan Anev Bulanan Aplikasi Sistem CMIS		0	3,750,000		
	- Foto copy : 60 lbr x 5 buku x 12 bulan x Rp. 250,-	3000.0 lbr	250	750,000		
	- jilid 5 buku x 12 bulan x Rp. 50.000,-	60.0 lap	50,000	3,000,000		
	>> Penyusunan Anev Tahunan Aplikasi Sistem CMIS		0	860,000		
	- Foto copy : 130 lbr x Rp. 250,- x 8 buku	1040.0 lbr	250	260,000		
	- jilid 8 buku x Rp. 75.000,-	8.0 Lap	75,000	600,000		
	>> Penyusunan Anev Semester Fungsi Bid PDAKT		0	1,000,000		
	- Foto copy laporan 100 lbr x 10 buku x Rp. 250	1000.0 lbr	250	250,000		
	- Jilid 10 buku x Rp. 75.000,-	10.0 lap	75,000	750,000		
060.01.BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri			8,510,786,000		
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras			8,510,786,000		
5059.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan		8,510,786,000		
	Lokasi : KOTA JAKARTA SELATAN					
5059.EBA.994	**Layanan Perkantoran**	**1.0 Layanan**		**8,510,786,000**		
002	**Operasional dan Pemeliharaan Kantor**			**8,510,786,000**	**U**	
AY	*PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4*			*388,000,000*		
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			388,000,000		RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Ranjab Eselon II Roda 4	1.0 UNIT	38,000,000	38,000,000		
	- Ranmor Operasional Roda 4	14.0 UNIT	25,000,000	350,000,000		
BB	*PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2*			*73,500,000*		
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			73,500,000		RM
	(KPPN.088-Jakarta III)					
	- Ranmor Roda 2	21.0 UNIT	3,500,000	73,500,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB **(060)** KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BH	*PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR*			***89,230,000***	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			89,230,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	- Pemeliharaan, Perbaikan Komputer	37.0 UNIT	730,000	27,010,000	
	- Pemeliharaan/Perawatan Mesin foto copy besar	3.0 UNIT	5,000,000	15,000,000	
	- Pemeliharaan, Perbaikan Notebook	42.0 UNIT	730,000	30,660,000	
	- Perbaikan dan perawatan Printer	20.0 UNIT	690,000	13,800,000	
	- Perbaikan dan perawatan Scanner	4.0 unit	690,000	2,760,000	
BI	*PEMELIHARAAN PERALATAN FUNGSIONAL*			***7,290,156,000***	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			7,290,156,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Penggantian, Perbaikan dan Perawatan Peralatan Fungsional Sistem PIKNAS dan CMIS sebagai berikut :			6,770,624,000	
	>> PEMELIHARAAN SISTEM PIKNAS		0	0	
	>> Management Project		0	280,192,000	
	- Project Manager, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer / Sistem Informasi, berpengalaman minimal 3 tahun	5.0 ob	19,300,000	96,500,000	
	- Project Admin, S1 Administrasi Perkantoran/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Teknik Industri/ Ilmu Komunikasi, berpengalaman	5.0 ob	10,300,000	51,500,000	
	- Solution Architect, S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Elektro/ Teknik Industri/ Matematika, berpengalaman minimal 2 tahun	2.0 ob	20,000,000	40,000,000	
	- Sistem Integrator, S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi, berpengalaman minimal 3 tahun di bidang Big Data dan Sistem Enterprise	3.0 ob	20,000,000	60,000,000	
	- Technical Enginner, S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Elektro/ Teknik Industri/ Matematika, berpengalaman minimal 3 tahun.	2.0 ob	16,096,000	32,192,000	
	>> Pemeliharaan Perangkat Infrastruktur		0	259,200,000	
	- Technical Support Hardware, S1 Teknik Komputer/Teknik Informatika, berpengalaman minimal 3 tahun	24.0 ob	10,800,000	259,200,000	
	>> Perpanjangan Warranty		0	2,633,500,000	
	- Server HPE DL360 Gen9	1.0 Unit	43,085,000	43,085,000	
	- Server HPE DL580 Gen9	8.0 Unit	89,750,000	718,000,000	
	- Server HPE DL580 Gen10	5.0 Unit	73,615,000	368,075,000	
	- Storage Netapp FAS8200	1.0 Cltrs	583,642,000	583,642,000	
	- Storage Netapp FAS2554	1.0 Clstr	114,092,000	114,092,000	
	- Switch Storage Brocade 6510	2.0 Unit	58,621,000	117,242,000	
	- Antivirus for Server (Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus)	20.0 unit	1,046,000	20,920,000	
	- Antivirus for Client (Kaspersky Small O¿ice Security)	30.0 Unit	493,000	14,790,000	
	- Red Hat Openshift Container Platform (2 Cores or 4 vCPUs)	11.0 Unit	56,110,000	617,210,000	
	- Red Hat Enterprise Linux Server (Physical or Virtual Nodes)	2.0 Unit	18,222,000	36,444,000	
	>> Pemeliharaan Data, Visualisasi Informasi dan Integrasi		0	0	
	>> Pemeliharaan Data		0	358,960,000	
	- Bisnis Analis, S1 Hukum/ Kepolisian/ Sistem Informasi, berpengalaman minimal 3 tahun	2.0 ob	16,096,000	32,192,000	
	- Database Administrator, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	8.0 ob	16,096,000	128,768,000	
	- Operator Data dan Informasi, SMK Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)/ Teknik Elektronika Industri/ Adm. Perkantoran/ Sistem Informasi/ Teknik Informatika/Teknik Industri/SMA, berpengalaman minimal 2 tahun	40.0 ob	4,950,000	198,000,000	
	>> Pemeliharaan Visualisasi Informasi		0	256,684,000	
	- Bisnis Analis, S1 Hukum/ Kepolisian/ Sistem Informasi, berpengalaman minimal 3 tahun	4.0 ob	16,096,000	64,384,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB **(060)** KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Sistem Analis, S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Elektro/ Teknik Industri/ Matematika, berpengalaman minimal 3 tahun	5.0 ob	20,640,000	103,200,000	
	- Operator Visualisasi Informasi, SMK Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)/Teknik Elektronika Industri/ Adm Perkantoran/ Sistem Informasi// Teknik Informatika/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 2 tahun	18.0 ob	4,950,000	89,100,000	
	>> Pemeliharaan Integrasi		0	257,536,000	
	- Bisnis Analis, S1 Hukum/ Kepolisian/ Sistem Informasi, berpengalaman minimal 3 tahun	4.0 ob	16,096,000	64,384,000	
	- Service Integration, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi, berpengalaman minimal 3 tahun	6.0 ob	16,096,000	96,576,000	
	- Database Administrator, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	6.0 ob	16,096,000	96,576,000	
	>> Pemeliharaan Perangkat Lunak/Aplikasi		0	0	
	>> Aplikasi Website		0	266,576,000	
	- Programmer Java, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	3.0 ob	16,096,000	48,288,000	
	- Desain Grafis, S1 Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis/ Ilmu Komunikasi, berpengalaman minimal 3 tahun	3.0 ob	13,000,000	39,000,000	
	- Database Administrator, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	3.0 ob	16,096,000	48,288,000	
	- Technical Support Website, S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	5.0 ob	13,000,000	65,000,000	
	- Jurnalistik, S1 Jurnalistik/ Sastra/ Kriminologi, berpengalaman minimal 3 tahun.	6.0 ob	11,000,000	66,000,000	
	>> Aplikasi Peta Wilayah Hukum		0	48,288,000	
	- Programmer Java, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	1.0 ob	16,096,000	16,096,000	
	- Programmer GIS, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	1.0 ob	16,096,000	16,096,000	
	- Database Administrator, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	1.0 ob	16,096,000	16,096,000	
	>> Aplikasi Dashboard		0	206,768,000	
	- Programmer Java, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	2.0 ob	16,096,000	32,192,000	
	- Database Administrator, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	2.0 ob	16,096,000	32,192,000	
	- Business Intelligence, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	4.0 ob	16,096,000	64,384,000	
	- Desain Grafis, S1 Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis/ Ilmu Komunikasi, berpengalaman minimal 3 tahun	2.0 ob	13,000,000	26,000,000	
	- Technical Support Software, S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Teknik Inudstri, berpengalaman minimal 3 tahun	4.0 ob	13,000,000	52,000,000	
	>> Aplikasi Catatan Kriminal		0	418,496,000	
	- Programmer Java, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	5.0 ob	16,096,000	80,480,000	
	- Database Administrator, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi, berpengalaman minimal 3	7.0 ob	16,096,000	112,672,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- tahun	7.0 ob	16,096,000	112,672,000	
	- Sistem Integrator, S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi, berpengalaman minimal 3 tahun di bidang Big Data dan Sistem Enterprise	14.0 ob	16,096,000	225,344,000	
	>> Aplikasi OPS		0	636,448,000	
	- Sistem Analis, S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Elektro/ Teknik Industri/ Matematika/Komputer, berpengalaman minimal 3 tah	9.0 ob	20,640,000	185,760,000	
	- Programmer Java, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Komputer/Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	10.0 ob	16,096,000	160,960,000	
	- Programmer Javascript, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Komputer/Teknik Industri, berpengalaman minimal 3	10.0 ob	16,096,000	160,960,000	
	- Database Administrator, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/Komputer, berpengalaman minimal 3 tahun	8.0 ob	16,096,000	128,768,000	
	>> Aplikasi Tata Kelola Pengguna		0	64,384,000	
	- Programmer Java, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	2.0 ob	16,096,000	32,192,000	
	- Database Administrator, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	2.0 ob	16,096,000	32,192,000	
	>> Aplikasi Master Data Manajemen		0	64,384,000	
	- Programmer Java, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	2.0 ob	16,096,000	32,192,000	
	- Database Administrator, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	2.0 ob	16,096,000	32,192,000	
	>> Aplikasi Manajemen Source Code		0	78,000,000	
	- Technical Support Software, S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	6.0 ob	13,000,000	78,000,000	
	>> Aplikasi Project Management System		0	271,152,000	
	- Sistem Analis, S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Elektro/ Teknik Industri/ Matematika, berpengalaman minimal 3 tahun	6.0 ob	16,096,000	96,576,000	
	- Programmer Java, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	6.0 ob	16,096,000	96,576,000	
	- Database Administrator, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	6.0 ob	13,000,000	78,000,000	
	>> Aplikasi PPNS		0	64,384,000	
	- Programmer Java, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	2.0 ob	16,096,000	32,192,000	
	- Database Administrator, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Komputer/ Teknik Industri, berpengalaman minimal	2.0 ob	16,096,000	32,192,000	
	>> Aplikasi SDGs		0	39,000,000	
	- Technical Support Software, S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	3.0 ob	13,000,000	39,000,000	
	>> Aplikasi Portal		0	566,672,000	
	- Sistem Analis, S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Elektro/ Teknik Industri/ Matematika/Komputer, berpengalaman minimal 3 tah	4.0 ob	20,640,000	82,560,000	
	- Programmer Java, S1 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Sistem Informasi/ Komputer/Teknik Industri, berpengalaman minimal 3 tahun	14.0 ob	16,096,000	225,344,000	
	- Programmer Javascript, S1 Teknik Informatika/ Teknik	8.0 ob	16,096,000	128,768,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA (678164) PUSIKNAS BARESKRIM POLRI
ALOKASI Rp. 17,264,940,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Komputer/ Sistem Informasi/ Komputer/Teknik Industri, berpengalaman minimal 3	8.0 ob	16,096,000	128,768,000	
	- Solution Architect, S1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Elektro/ Teknik Industri/Komputer/ Matematika, berpengalaman minimal	10.0 ob	13,000,000	130,000,000	
	> Pemeliharaan Perangkat Lunak/Aplikasi CMIS (Case Management Intelligent Sistem)			519,532,000	
	>> Management Project		0	147,964,000	
	- Project Manager, S2 berpengalaman 5 tahun, Bersertifikat	3.0 ob	27,860,000	83,580,000	
	- Techinal Writer, S1 berpengalaman 3 tahun, Tidak Bersertifikat	2.0 ob	16,096,000	32,192,000	
	- Project Admin, S1, Pengalaman 2 Tahun, Tidak Bersertifikat	2.0 ob	16,096,000	32,192,000	
	>> Penyempurnaan pengelolaan data dinamis pada Data Dukung, Laporan Polisi, Laporan Polisi CMIS		0	0	
	>> Tenaga Ahli		0	133,312,000	
	- Java Programmer, S1, Pengalaman 3 Th. Tidak Bersertifikat	5.0 ob	16,096,000	80,480,000	
	- System Analyst, S1, Pengalaman 5 Th. Bersertifikat	1.0 0b	20,640,000	20,640,000	
	- Aplication Tester, S1, Pengalaman 3 Th. Tidak Bersertifikat	1.0 ob	16,096,000	16,096,000	
	- DB Administrator, S1, Pengalaman 3 Tahun, tidak bersertifikat	1.0 ob	16,096,000	16,096,000	
	>> Penyempurnaan User Interface (UI) dan Fitur Query Builder Visualization pada aplikasi CMIS		0	0	
	>> Tenaga Ahli		0	133,312,000	
	- Java Programmer, S1, Pengalaman 3 Th. Tidak Bersertifikat	5.0 ob	16,096,000	80,480,000	
	- System Analyst, S1, Pengalaman 5 Th. Bersertifika	1.0 ob	20,640,000	20,640,000	
	- Aplication Tester, S1, Pengalaman 3 Th. Tidak Bersertifikat	1.0 ob	16,096,000	16,096,000	
	- DB Administrator, S1, Pengalaman 3 Th. Tidak bersertifikat	1.0 ob	16,096,000	16,096,000	
	>> Pembelian Lisensi GoJs untuk 1 tahun		0	19,920,000	
	- ILisensi GoJs Vers.2.1	12.0 bln	1,660,000	19,920,000	
	>> Penyesuaian modul user management		0	0	
	>> Tenaga Ahli :		0	85,024,000	
	- Java Programmer, S1, Pengalaman 3 Th. Tidak Bersertifikat	2.0 ob	16,096,000	32,192,000	
	- System Analyst, S1, Pengalaman 5 Th. Bersertifikat	1.0 ob	20,640,000	20,640,000	
	- Aplication Tester, S1, Pengalaman 3 Th. Tidak Bersertifikat	1.0 ob	16,096,000	16,096,000	
	- DB Administrator, S1, Pengalaman 3 Th. Tidak bersertifikat	1.0 ob	16,096,000	16,096,000	
BR	*SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI (LEASED CHANNEL) SATELIT*			*669,900,000*	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			669,900,000	RM
	(KPPN.088-Jakarta III)				
	> Layanan Komunikasi Data			669,900,000	
	- Sewa Layanan Internet Dedicated Internasional 100 Mbps	12.0 unit	55,825,000	669,900,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Jakarta Selatan, 30 Mei 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HERU DWI PRATONDO, S.H.,M.M.
NRP 65100673

LAPORAN REKAPITULASI ANGGARAN T.A 2023

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE/NAMA UNIT		BELANJA PEGAWAI (OPERASIONAL)	BELANJA BARANG		BELANJA MODAL		BANTUAN SOSIAL	JUMLAH	
			Operasional	Non Opr.	Operasional	Non Opr.			
1		2	3	4	5	6	7	8	
060	**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**	**6,173,502**	**8,663,458**	**2,437,980**	**0**	**0**	**0**	**17,264,940**	
060.01	**Kepolisian Negara Republik Indonesia**	**6,173,502**	**8,663,458**	**2,437,980**	**0**	**0**	**0**	**17,264,940**	
060.01.BI	**Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana**	**6,173,502**	**142,672**	**2,437,980**	**0**	**0**	**0**	**8,754,154**	
3137	**Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana**	**6,173,502**	**142,672**	**344,671**	**0**	**0**	**0**	**6,660,845**	
3137.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**6,173,502**	**142,672**	**344,671**	**0**	**0**	**0**	**6,660,845**	**RM**
	VOLUME KRO : 2 Layanan								
3137.EBA.007	**Layanan Umum Dukungan Manajemen Lidik Sidik**	**0**	**0**	**344,671**	**0**	**0**	**0**	**344,671**	**RM**
	VOLUME RO : 1 Layanan								
- 678164 - D00	PUSIKNAS BARESKRIM POLRI	0	0	344,671	0	0	0	344,671	RM
	VOLUME : 1 Layanan								
3137.EBA.994	**Layanan Perkantoran**	**6,173,502**	**142,672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,316,174**	**RM**
	VOLUME RO : 1 Layanan								
- 678164 - D00	PUSIKNAS BARESKRIM POLRI	6,173,502	142,672	0	0	0	0	6,316,174	RM
	VOLUME : 1 Layanan								
5084	**Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional**	**0**	**0**	**2,093,309**	**0**	**0**	**0**	**2,093,309**	
5084.BMA	**Data dan Informasi Publik**	**0**	**0**	**2,093,309**	**0**	**0**	**0**	**2,093,309**	**RM**
	VOLUME KRO : 1,858 layanan								
5084.BMA.001	**Penyajian Informasi Kriminal Nasional**	**0**	**0**	**2,093,309**	**0**	**0**	**0**	**2,093,309**	**RM**
	VOLUME RO : 1,858 layanan								
- 678164 - D00	PUSIKNAS BARESKRIM POLRI	0	0	2,093,309	0	0	0	2,093,309	RM
	VOLUME : 1,858 layanan								
060.01.BP	**Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri**	**0**	**8,510,786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,510,786**	
5059	**Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras**	**0**	**8,510,786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,510,786**	
5059.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**	**0**	**8,510,786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,510,786**	**RM**
	VOLUME KRO : 1 Layanan								
5059.EBA.994	**Layanan Perkantoran**	**0**	**8,510,786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,510,786**	**RM**
	VOLUME RO : 1 Layanan								
- 678164 - D00	PUSIKNAS BARESKRIM POLRI	0	8,510,786	0	0	0	0	8,510,786	RM
	VOLUME : 1 Layanan								

RM	6,173,502	8,653,458	2,437,980	0	0	0	17,264,940	
PINJ. VALAS	0	0	0	0	0	0	0	
RPLN	0	0	0	0	0	0	0	
L.COST/RMP	0	0	0	0	0	0	0	
PNBP	0	0	0	0	0	0	0	
PDN	0	0	0	0	0	0	0	
BLU	0	0	0	0	0	0	0	
STM	0	0	0	0	0	0	0	
HDN	0	0	0	0	0	0	0	
HDN LANGSUNG	0	0	0	0	0	0	0	
HIBAH VALAS	0	0	0	0	0	0	0	
HIBAH RHLN	0	0	0	0	0	0	0	
HIBAH LUAR LANGSUNG	0	0	0	0	0	0	0	
SA-BLU	0	0	0	0	0	0	0	
SBSN-PBS	0	0	0	0	0	0	0	
T O T A L.	6,173,502	8,653,458	2,437,980	0	0	0	17,264,940	

LAPORAN PERLOKASI / SATKER / OUTPUT T.A 2023

(DALAM RIBUAH RUPIAH)

KODE / URAIAN		BELANJA PEGAWAI (Operasional)	BELANJA BARANG		BELANJA MODAL		BANTUAN SOSIAL	JUMLAH
			Operasional	Non Opr	Operasional	Non Opr		
1		2	3	4	5	6	7	8
060.01	Kepolisian Negara Republik Indonesia	6,173,502	8,653,458	2,437,980	0	0	0	17,264,940
01	DKI JAKARTA	6,173,502	8,653,458	2,437,980	0	0	0	17,264,940
678164 - D00	PUSIKNAS BARESKRIM POLRI	6,173,502	8,653,458	2,437,980	0	0	0	17,264,940
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,173,502	142,672	344,671	0	0	0	6,660,845
BMA	Data dan Informasi Publik	0	0	2,093,309	0	0	0	2,093,309
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	0	8,510,786	0	0	0	0	8,510,786
TOTAL		6,173,502	8,653,458	2,437,980	0	0	0	17,264,940

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Jakarta 12110

LAMPIRAN " M M M " SURAT KAPOLRI
NOMOR : B/ 3762/IV/REN 2.3/2022/SRENA
TANGGAL : 13 MEI 2022

PAGU INDIKATIF SATKER PUSIKNAS BARESKRIM POLRI T.A. 2023

Rupiah Murni

(dalam ribu rupiah)

PROGRAM/KEGIATAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG		BELANJA MODAL	JUMLAH
		OPSNAL (002)	NON OPSNAL (003)		
1	2	3	4	5	6
BI-PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	-	**142.672**	**2.437.980**		**2.580.652**
3137-Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	-	142.672	344.671		487.343
5084-Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional		-	2.093.309		2.093.309
BP-PROGRAM MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA PRASARANA POLRI		**8.510.786**	-	-	**8.510.786**
3084-Pengembangan Peralatan Polri					-
5059-Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras		8.510.786			8.510.786
JUMLAH	-	**8.653.458**	**2.437.980**	-	**11.091.438**

Catatan :	ALOKASI
I. Pagu Belanja Pegawai dihitung berdasarkan DPP bulan April 2022	
II. Pagu yang tidak dapat diubah/digeser/realokasi dan wajib dipenuhi sesuai Pagu Indikatif T.A. 2022	
Har Peralatan	3.543.139
	-

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ASRENA

WAHYU HADININGRAT, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

PAGU INDIKATIF BELANJA PEGAWAI TA. 2023
SATKER PUSIKNAS BARESKRIM POLRI

(dalam ribu rupiah)

NO	SATKER	PROGRAM				
		WA-Program Dukungan Manajemen	BP-Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	BD-Program Profesionalisme SDM Polri	BQ-Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	BI-Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
1	2	3	4	5	6	7
1	PUSIKNAS BARESKRIM POLRI	-	-	-	-	6,173,502
JUMLAH						**6,173,502**

Jakarta, 3 Juni 2022

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

HERU DWI PRATONDO, S.H.,M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

RINCIAN
PAGU INDIKATIF BELANJA PEGAWAI TA. 2023
SATKER PUSIKNAS BARESKRIM POLRI

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	KET.
511161	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri			1,708,154,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	1 THN	1,464,132,000		
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1 BLN	122,011,000		
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1 BLN	122,011,000		
511169	Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri			24,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji Pokok PNS TNI/Polri	1 THN	20,000		
	- Belanja Pembulatan Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1 BLN	2,000		
	- Belanja Pembulatan Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1 BLN	2,000		
511171	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri			122,290,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	1 THN	104,820,000		
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1 BLN	8,735,000		
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1 BLN	8,735,000		
511172	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri			35,596,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	1 THN	30,588,000		
	- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri (gaji ke 13)	1 BLN	2,549,000		
	- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri (gaji ke 14)	1 BLN	2,459,000		
511173	Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri			315,420,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	1 THN	270,360,000		
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri (gaji ke 13)	1 BLN	22,530,000		
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/Polri (gaji ke 14)	1 BLN	22,530,000		
511175	Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri			4,242,000	
	- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri	1 THN	3,636,000		
	- Belanja Tunj. PPH TNI/Polri (gaji ke 13)	1 BLN	303,000		
	- Belanja Tunj. PPH TNI/Polri (gaji ke 14)	1 BLN	303,000		
511176	Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri			79,092,000	
	- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	1 THN	79,092,000		

- Belanja .....

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	KET.
511179	Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri			343,000,000	
	- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	1 THN	343,000,000		
511193	Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri			17,920,000	
	- Belanja Tunj. Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	1 THN	15,360,000		
	- Belanja Tunj. Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 13)	1 BLN	1,280,000		
	- Belanja Tunj. Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 14)	1 BLN	1,280,000		
511211	Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI			1,916,152,000	
	- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri	1 THN	1,642,416,000		
	- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 13)	1 BLN	136,868,000		
	- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 14)	1 BLN	136,868,000		
511219	Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI			24,000	
	- Belanja Pembulatan TNI/Polri	1 THN	20,000		
	- Belanja Pembulatan TNI/Polri (gaji ke 13)	1 BLN	2,000		
	- Belanja Pembulatan TNI/Polri (gaji ke 14)	1 BLN	2,000		
511221	Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI			147,952,000	
	- Belanja Suami/Istri TNI/Polri	1 THN	126,816,000		
	- Belanja Suami/Istri TNI/Polri (gaji ke 13)	1 BLN	10,568,000		
	- Belanja Suami/Istri TNI/Polri (gaji ke 14)	1 BLN	10,568,000		
511222	Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI			17,948,000	
	- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri	1 THN	11,816,000		
	- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri (gaji ke 13)	1 BLN	3,066,000		
	- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri (gaji ke 14)	1 BLN	3,066,000		
511223	Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI			551,250,000	
	- Belanja Struktural TNI/Polri	1 THN	472,500,000		
	- Belanja Struktural TNI/Polri (gaji ke 13)	1 BLN	39,375,000		
	- Belanja Struktural TNI/Polri (gaji ke 14)	1 BLN	39,375,000		
511225	Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI			53,018,000	
	- Belanja Tunj. PPh TNI/Polri	1 THN	45,444,000		
	- Belanja Tunj. PPh TNI/Polri (gaji ke 13)	1 BLN	3,787,000		
	- Belanja Tunj. PPh TNI/Polri (gaji ke 14)	1 BLN	3,787,000		

- Belanja .....

KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	KET.
511226	Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI			98,814,000	
	- Belanja Tunj. Beras TNI/Polri	1 THN	98,814,000		
511228	Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI			714,240,000	
	- Belanja Tunj. Lauk Pauk TNI/Polri	1 THN	714,240,000		
511232	Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI			3,500,000	
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/Polri	1 THN	3,000,000		
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/Polri (gaji ke 13)	1 BLN	250,000		
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/Polri (gaji ke 14)	1 BLN	250,000		
511244	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri			7,350,000	
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	1 THN	6,300,000		
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 13)	1 BLN	525,000		
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 14)	1 BLN	525,000		
512211	Belanja Uang Lembur			37,516,000	
	- Uang Lembur Gol. II (4 ORG, x 3 JAM x 108 Hari)	1,296 OJ	9,000	11,664,000	
	- Uang Lembur Gol. III (3 ORG, x 3 JAM x 108 Hari)	972 OJ	11,000	10,692,000	
	- Uang Makan (7 ORG, x 108 Hari)	758 OJ	20,000	15,160,000	
JUMLAH				**6,173,502,000**	

Jakarta, 3 Juni 2022

KEPALA PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL

HERU DWI PRATONDO, S.H.,M.M.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 13 Mei 2022

Nomor : B/ 3762 /V/REN.2.3./2022/Srena
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : satu berkas
Perihal : Pagu Indikatif Polda/Satker T.A. 2023.

Kepada

Yth. DISTRIBUSI A2, B DAN C
MABES POLRI

di

Tempat

1. Rujukan:

   a. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

   b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

   c. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

   d. Surat Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan pembangunan Nasional Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/ PP.04.02/04/ 2022 tanggal 18 April 2022 hal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas telah menetapkan Pagu Indikatif Polri T.A. 2023 sebesar Rp 95,100 triliun berkurang sebesar 15,923 triliun atau 14,34% dari Alokasi Anggaran Polri T.A. 2022 sebesar Rp 111,024 triliun

dengan ....

dengan komposisi belanja pegawai Rp 54,908 triliun (57,74%), belanja barang Rp 30,562 triliun (32,14%) dan belanja modal Rp 9,629 triliun (10,13%).

3. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Rancangan RKA Satker T.A. 2023 bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, alokasi Pagu Indikatif T.A. 2023 Satker tingkat Mabes Polri dan Polda yang disusun berdasarkan usulan Satker/Polda, disesuaikan dengan arah kebijakan dan sasaran prioritas dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, Pedoman Perencanaan Polri Tahun 2023 serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

4. Setelah menerima Pagu Indikatif T.A. 2023, diharapkan segera **menyusun Rancangan RKA Satker** dengan memedomani sasaran prioritas dan arah kebijakan RKP tahun 2023, Pedoman Perencanaan Kapolri Tahun 2023 dan Rancangan Rencana Kerja Polri/Satker T.A. 2023 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a. memperbaiki proses penyusunan perencanaan anggaran dengan pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada program-program prioritas pemerintah yang telah dibuat (*money follow program*) sehingga bisa lebih terlihat kemanfaatannya, tidak lagi mendasari pada fungsi (*money follow function*);

   b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan;

   c. pengalokasian anggaran **disusun sampai dengan unit kerja pelaksana** berdasarkan analisis beban kerja secara proporsional dan profesional dengan memperhatikan sumber daya *input* (SDM, Sarpras dan anggaran) sesuai **program prioritas dan target kinerja bidang keamanan yang telah ditetapkan** serta terintegrasi dan berkelanjutan sesuai prinsip pendekatan penganggaran (tidak ***copy paste*** kegiatan tahun sebelumnya);

   d. pengalokasian anggaran lebih difokuskan pada **sasaran prioritas dan berkualitas serta meningkatkan operasional kepolisian pada unit-unit Opsnal kepolisian terdepan (Polres dan Polsek)** dalam rangka meningkatkan kehadiran anggota Polri selaku alat negara dalam melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara serta meningkatkan pelayanan publik;

   e. penyusunan anggaran Satker harus melalui **proses pengkajian atau *monitoring* dan evaluasi dengan skala prioritas, memperhatikan spesifikasi teknis, harga ekonomis dan rasional** berdasarkan asas manfaat serta telah memprediksikan kalender Kamtibmas yang diperkirakan terjadi Tahun 2023;

   f. sudah mengalokasikan anggaran untuk **kebutuhan Operasional Satker Mabes, Polda, Polres dan Polsek** yang baru sesuai persetujuan pembentukan struktur organisasi dari Kementerian PANRB serta telah diterbitkan Keputusan Kapolri dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam pagu Satker Mabes/Polda;

g. tidak .....
h.

g. tidak diperkenankan melakukan **pergeseran antar sumber pendanaan** (RM, PLN, PDN, PNBP dan BLU);

h. melaksanakan penyusunan RKA Satker Pagu Indikatif Polri T.A. 2023 mendasari pada **struktur program dan kegiatan (KRO-RO) yang baru** dengan memedomani **konsistensi bidang anggaran**;

i. dalam penyusunan RKA Satker agar **menguraikan setiap detail kegiatan** tidak menggunakan **satuan paket, tambahan dan atau tahun**;

j. penyusunan RKA Satker secara komprehensif dengan memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, sehingga menghasilkan RKA yang dapat diimplementasikan, diharapkan setiap kegiatan yang direncanakan telah dikoordinasikan dengan pembina fungsi dan unit-unit kerja pelaksana;

k. penyusunan RKA Satker agar memedomani pembebanan akun, penempatan alokasi belanja barang operasional (002), belanja dukungan operasional Harkam (003) dan non operasional lainnya, **untuk sumber PNBP dan BLU seluruhnya dialoksikan pada komponen belanja dukungan operasional Harkam (003);**

l. alokasi anggaran dalam rangka penanganan *Covid-19* dan PEN, agar menggunakan akun khusus Penanganan Pandemi *Covid-19*;

m. **penyusunan Belanja Pegawai** dalam rancangan RKA Satker agar memedomani:

   1) menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian gaji tunjangan ke-13 dan THR;

   2) perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan menggunakan *data base* dalam aplikasi RKA-K/L yang disesuaikan dengan DPP bulan April 2022;

   3) memperhitungkan gaji pokok anggota Polri sesuai peraturan perundang-undangan;

   4) mengalokasikan uang lembur dan makan lembur maksimal sama dengan alokasi anggaran T.A. 2022;

   5) memperhitungkan kebutuhan tunjangan kemahalan, wilayah pulau-pulau kecil terluar dan perbatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

n. **penyusunan Belanja Barang** dalam rancangan RKA Satker agar memedomani:

   1) memperhitungkan kegiatan Presisi Polri dalam kegiatan rutin dengan mengoptimalkan anggaran rutin;

   2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja barang dengan memperhitungkan peningkatan harga barang dan jasa serta menjaga besaran alokasi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan *output* dan kemampuan penyerapan anggaran melalui **implementasi *punishment* secara konsisten**;

3) pengendalian .....

3) pengendalian belanja barang, utamanya perjalanan dinas, rapat, dan honor;

4) kebijakan inovatif seperti penerapan *Work From Home* (*WFH*) dan *open space* ruang kerja;

5) **penajaman belanja pemeliharaan sesuai penambahan aset;**

6) **membatasi/mengurangi komponen pendukung** pencapaian *output* yang tidak terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat antara lain: perjalanan dinas dalam dan luar negeri, rapat dan konsinyering di luar kantor, honorarium tim dan kegiatan lain yang sejenis atau serupa;

7) memperhitungkan kecukupan kebutuhan anggaran **pembayaran tagihan listrik, telepon dan gas/air,** dialokasikan pada Satker pengguna **sampai dengan tingkat Polres** dengan memperhitungkan kekurangan tahun 2022, dan proyeksi penggunaan tahun 2023;

8) mengalokasikan anggaran kegiatan **fungsi teknis kepolisian sampai dengan tingkat Polsek** serta lebih mengutamakan kecukupan alokasi anggaran untuk pencapaian target *output* pada kegiatan teknis dibandingkan kegiatan pendukung;

9) mengalokasikan anggaran pada program lidik sidik dengan memperhitungkan, **jumlah tindak pidana, kecukupan kebutuhan anggaran makan dan perawatan tahanan** dengan memperhitungkan kekurangan tahun sebelumnya serta menjaga **target kinerja lidik sidik tindak pidana korupsi minimal sama dengan T.A. 2022**;

10) memperhitungkan anggaran lidik sidik Polsek yang **tidak melaksanakan kegiatan penyidikan** disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik wilayah hukum Polres;

11) mengalokasikan anggaran operasional **Bhabinkamtibmas sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)**/per orang/per hari selama 252 hari dalam satu tahun;

12) mengalokasikan anggaran **Dukops** satuan wilayah sampai **tingkat Polsek,** dengan besaran alokasi anggaran Dukops Polres dan Polsek disesuaikan dengan tingkat kerawanan wilayahnya, minimal sama dengan T.A. 2022;

13) memperhitungkan kecukupan kebutuhan anggaran **operasi 2023, Operasi Ketupat 2023, Operasi Lilin 2023 serta Operasi Kewilayahan lainnya** sesuai dengan karakteristik wilayah setempat dan dialokasikan sampai dengan Satker pelaksana (Polres);

14) pengalokasian anggaran didekatkan pada unit pelayanan terdepan termasuk **pengalokasian BMP** pada **Satker Rolog, Ditsamapta, Ditpolairud, Satbrimob, SPN dan Polres** berdasarkan pendekatan sistem penganggaran terpadu dan berbasis kinerja serta memperpendek birokrasi;

15) pengalokasian ...

15) pengalokasian anggaran didekatkan pada unit pelayanan terdepan termasuk **pengalokasian BMP** pada **Satker Rolog, Ditsamapta, Ditpolairud, Satbrimob, SPN dan Polres** berdasarkan pendekatan sistem penganggaran terpadu dan berbasis kinerja serta memperpendek birokrasi;

16) anggaran direktif Kapolri tingkat Mabes Polri dialokasikan pada Satker Puskeu Polri yang penggunaannya melalui mekanisme direktif Kapolri berdasarkan *requisisi* Asops Kapolri dan penelaahan Asrena Kapolri, anggaran direktif Kapolri Korbrimob Polri dialokasikan pada Satker Korbrimob Polri yang penggunaannya melalui mekanisme direktif Kapolri berdasarkan *requisisi* Dankorbrimob Polri dan penelaahan Asrena Kapolri, sedangkan anggaran direktif Kapolri Polda dialokasikan pada Satker Roops Polda yang penggunaannya melalui mekanisme direktif Kapolda berdasarkan hasil penelaahan dari Karorena Polda;

17) penyesuaian dukungan anggaran kegiatan Turwali dengan memedomani Norma Indeks Polri T.A. 2023;

18) alokasi anggaran yang **tidak dapat diubah/digeser/direalokasi** besaran rupiahnya sesuai catatan pada halaman pagu;

19) Lemdiklat Polri menghittung kebutuhan anggaran T.A. 2023 pada kegiatan 3100 (penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri) untuk Opsdik dan Kapor sampai dengan Satker pelaksana;

20) SSDM Polri menghittung kebutuhan anggaran T.A. 2023 pada kegiatan 3105 (Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri), 3107 (Pengendalian Pegawai Polri), 3108 (Pembinaan Karier Personel Polri) dan 3110 (Pembinaan Psikologi Anggota Polri);

o. anggaran belanja modal belum dapat dipertimbangkan untuk dialokasikan dalam penetapan pagu indikatif Satker T.A. 2023, mengingat usulan belanja modal dari Satker/Polda belum dilengkapi dengan data dukung antara lain berupa *blue print* kebutuhan peralatan, *TOR*, *RAB*, hasil kajian/studi kelayakan, *clearance dari PU dan status tanah;*

p. target BLU dan PNBP Fungsional (SDM, Pamobvit, Diklat dan Dokkes) melekat pada Satker pelaksana sesuai alokasi pegu penggunaan yang diperhitungkan. Untuk pagu PNBP Pamobvit di Satker Polda/Polres tidak digunakan untuk Kegiatan Sistem Manajemen Pengamanan.

Penyusunan RKA Satker pagu indikatif Polri T.A. 2023 menggunakan aplikasi SAKTI yang berbasis *web* dengan mengakses situs **sakti.kemenkeu.go.ig**. Setelah penyusunan RKA Satker akan ditindaklanjuti **dengan penelitian/penelaahan dokumen pendukung oleh Srena Polri** , untuk itu diharapkan kepada tersebut alamat agar mengirimkan kelengkapan persyaratan **administrasi pendukung** berupa:

a. Kerangka ....

SURAT KAPOLRI
NOMOR : B/3462/V/REN.2.3./2022/SRENA
TANGGAL: 13 MEI 2022

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (*TOR*) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;

b. Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP) bulan April 2022 masing-masing Satker;

c. data fasilitas dan materiil/peralatan sesuai KIB, SIMAK BMN dan data Hibah;

d. tagihan pemakaian/tunggakan daya dan jasa listrik dari PLN, jasa telepon dari Telkom dan jasa air dari PDAM pada Januari s.d. Mei 2022;

e. pembayaran pemakaian daya dan jasa (LTGA) dari PLN, Telkom dan PDAM dari bulan Januari s.d. Mei 2022 dari masing-masing Satker pelaksana;

f. Keputusan Kapolda yang berisi rekapitulasi data Bhabinkamtibmas;

g. rekapitulasi distribusi anggaran **yang tidak dapat diubah/digeser/realokasi besaran rupiahnya** kepada Satker pelaksana;

h. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) untuk Satker BLU;

i. data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian RKA Satker Pagu Indikatif Polri T.A. 2022.

l. **Penyampaian** data pendukung melalui alamat *email*: bagrengarta.rojemengar@polri.go.id dan *approval* sebagai berikut:

a. **Satker tingkat Mabes Polri *approval* KPA** dilaksanakan **pada tanggal 31 Mei 2022**;

b. **Polda approval wilayah** dilaksanakan **pada tanggal 29 Mei 2022**.

m. Pelaksanaan kegiatan penelitian RKA Satker T.A. 2023 dan administrasi pendukung untuk Satker tingkat Mabes Polri dilaksanakan pada 27 sampai dengan 29 Mei 2022 dan untuk Polda pada tanggal 24 sampai dengan 27 Mei 2022.

n. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ASRENA

WAHYU HADININGRAT, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan:
1. Kapolri.
2. Wakapolri.